

**RELASI KUASA DALAM PENETAPAN HADIS SEBAGAI HUJAH DALAM  
BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR NU KE-33 TAHUN 2015**



**Oleh:**

**Pipin Armita, S.Ud  
NIM: 1520510034**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Agama

**YOGYAKARTA  
2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Pipin Armita
NIM	: 1520510034
Fakultas	: Ushuludin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Studi Quran Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 April 2017

Saya yang menyatakan,



**Pipin Armita, S. Ud**  
NIM: 1520510034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156  
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TESIS

Nomor : B.1274 /Un.02/DU/PP/05.3/05/2017

Tesis berjudul : RELASI KUASA DALAM PENETAPAN HADIS SEBAGAI  
HUJAH DALAM BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR NU KE-33  
TAHUN 2015

yang disusun oleh :

Nama : PIPIN ARMITA, S.Ud  
NIM : 1520510034  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Studi Al Qur'an Hadits  
Tanggal Ujian : 03 Mei 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 03 Mei 2017

Dekan,



Dr. M. R. Roswanto, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19681208 199803 1 002 2



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : RELASI KUASA DALAM PENETAPAN HADIS SEBAGAI  
HUJJAH DALAM BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR NU  
KE-33 TAHUN 2015

Nama : Pipin Armita, S.Ud  
NIM : 1520510034  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Drs. Hilmy Muhammad, S.Ag. M.A  
(Ketua/Penguji)

(  )

Sekretaris : Dr. Nurun Najwah, M.Ag  
(Sekretaris/Penguji)

(  )

Anggota : Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A  
(Penguji)

(  )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 03 Mei 2017

Waktu : 19.00 s/d 10.00 WIB  
Hasil/Nilai : A- (92)  
Prediket : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude\*

\*Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)  
Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr, wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**RELASI KUASA DALAM PENETAPAN HADIS SEBAGAI HUUJAH  
DALAM BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR NU KE-33 TAHUN 2015**

Yang ditulis oleh:

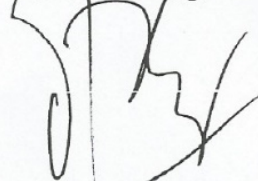
Nama	: Pipin Armita, S.Ud.
NIM	: 1520510034
Fakultas	: Ushuludin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Studi Quran dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister (S2) Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr, wb.*

Yogyakarta, 19 April 2017

Pembimbing,



**Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA**  
NIP: 19711203 2003121002

MOTTO:

***Hidup hanya sekali, jadi manfaatkanlah***

## Persembahan

*Tulisan ini persembahkan untuk kamu yang sedang dahaga dengan kesejukan ilmu..*

*Bukan sebagai obat dahaga, tapi semoga menjadi penambah dahagamu..*

## ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian hadis yang dilakukan terhadap hadis-hadis dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015. Dalam hal ini hadis sebagai hujjah diminta berbicara, mengomentari dan pada akhirnya memberi keputusan terhadap suatu permasalahan yang muncul, baik untuk membenarkan, membiarkan, menolak, atau bahkan menyalahkan. Padahal, pada dasarnya hadis yang ditetapkan sebagai hujjah tersebut, bukan berbicara dalam konteks yang sedang dibahas.

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) murni dan didukung oleh wawancara, dengan pendekatan analisa genealogis wacana dalam teori relasi kuasa dan pengetahuan yang dikenalkan oleh Michel Foucault. Dalam pendekatan ini mencakup aspek hermeneutika dan genealogi. Aspek hermeneutika akan memfokuskan perhatiannya pada wacana tafsir. Sedangkan, aspek genealogis digunakan untuk memperhatikan asal-usul atau hubungan sejarah antara kekuasaan, wacana, pengetahuan, dan kebenaran yang kemudian mempengaruhi pemikiran NU.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana diskursus-diskursus keagamaan yang telah diproduksi oleh relasi kuasa yang selanjutnya menopang dan menjustifikasi bekerjanya relasi-relasi kuasa tersebut; *pertama*, bagaimana genealogi pemahaman NU terhadap hadis yang dijadikan hujjah dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015. *Kedua*, bagaimanakah metode arkeologis NU dalam menetapkan hadis yang dijadikan hujjah dalam Bahtsul Masail tersebut. *Ketiga*, bagaimana pula bentuk relasi kuasa NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah dalam keputusan Bahtsul Masail tersebut.

Adapun hasil penelitian ini adalah: *pertama*, genealogi NU dapat dilihat dari dua sisi kesejarahannya, yaitu para pendiri NU dan pondok pesantren. Hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya pemikiran NU berawal dari keterpengaruhan ulama NU terhadap pemikiran ulama Haramain (Mekkah dan Madinah) dan dipengaruhi oleh tradisi pesantren di Jawa, khususnya mengenai tradisi *turatsnya*. *Kedua*, jika metode arkeologi NU dalam memahami hadis dilihat dengan perspektif Foucault, diketahui bahwa ada dua model penetapan hadis sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail Mukhtamar ke-33 tahun 2015; (1) hadis yang dikutip dari kitab hadis, (2) hadis yang dikutip dari selain kitab hadis seperti kitab syarah, kitab tafsir, kitab *fiqh*, dan lain-lain. *Ketiga*, penulis menemukan bahwa hadis-hadis tersebut ditetapkan sebagai hujjah karena memiliki relasi pengetahuan dan kekuasaan. Dari sepuluh pembahasan yang mengutip hadis secara langsung, diketahui bahwa; *pertama*, tiga pembahasan merupakan teknik pengaturan kekuasaan; yaitu hukum BPJS, penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang murah dan berkualitas, dan SDA untuk kesejahteraan rakyat. *Kedua*, lima pembahasan lainnya merupakan praktik pendisiplinan, yaitu hukum mengingkari janji bagi pemerintah, advokat dalam tinjauan fikih, hukuman mati dan HAM, perlindungan umat beragama menurut undang-undang, dan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. *Ketiga*, dua pembahasan praktik individualisasi, yakni khashais ahlu sunnah wa al-jama'ah dan utang luar negeri. Dalam konteks ini, kemudian lahirlah sebuah wacana Bahtsul Masail yang kemudian dibaca oleh masyarakat NU sebagai *reader* dan merespon. Sedangkan dalam hal ini ulama NU berperan sebagai *author* yang secara nirsadar dan amat tersamar melekat beroperasinya kekuasaan.

**Kata Kunci: Relasi Kuasa, Hadis, Hujjah, Bahtsul Masail**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati      كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati      فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati  بينكم	ditulis  ditulis	<i>ai</i>  <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati  قول	ditulis  ditulis	<i>au</i>  <i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.



السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Sesungguhnya segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ucapan Syukur ini rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan tesis yang berjudul: “Relasi Kuasa NU Dalam Penetapan Hadis Sebagai Hujjah Dalam Bahtsul Masail Muktamar NU Ke-33 Tahun 2015” yang merupakan pertolongan Allah SWT yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Alim Roswantoro, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum, M.A, selaku Ketua Prodi dan Bapak Imam Iqbal, S.Fil.I., M.SI., selaku Sekretaris Prodi Akidah dan Filsafat Islam Program Magister (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. KH Hilmy Muhammad, MA., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Ibu DR. Nurun Najwah, M.Ag. dan Bapak DR. Almakin, Ph.D selaku dosen penguji tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji tesis ini, memberi kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Muthiullah, M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
7. Karyawan TU Prodi yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik.
8. Orang tuaku tercinta Ayah dan omak yang terhebat, Amri dan Neneng Syamsiah. Kemudian untuk kakakku tersayang Kak Rima Agustin Tina, S. IP. *sang* motivator yang tidak pernah berkata ‘tidak’ untuk membahagiakan kami adik-adiknya. Kemudian untuk dua Adik kembarku

tercinta, cahaya mata; Ridho Al Faresi dan Rodhi Al Farosi, kalian motivasi, penyemangat dan harapan kami, terimakasih atas doa restu tulus yang selalu mengalir. Demikian kepada seluruh kerabat dan keluarga besarku, Kalian semua ‘pahlawanku’.

9. Saudariku tercinta yang banyak membantu, Kak Datun (Siti Mahmadatun, M.H), Febi (Fenni Febiana, M.H), Lala (Tiara Rochmawati, M.E), dan Yasir (Yasir Hayati, M.H). Kalian keluarga tawa-tangisku, *‘dulu, sekarang dan esok’*.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan SQH-A UIN SUKA mba Ria, mba Asiah, mba Alvi, mba Fifah, mba Fitri, mba Nisa, Izzi, Lucky, syaikh Miski, mas Hayy, mas Adib, mas Aqib, mas Kahfi, mas Imron, Syahrul, mas Mujahid, mas Yunus, Anshori, dan mba Faila, terimakasih atas segala dorongan, motivasi dan moril yang selalu diberikan, setelah sampai ke ‘Kota Gudeg’ ini kalian adalah keluarga baruku, semoga jadi sahabat yang kekal.
11. Saudari-saudariku di kontrakan ceria, Itz Imeh (Siti Rohimah, S. Kom) *kesayangan ibok yang paling rapi dan bersih*, Martinus Elsyalaby Grosir (Martina, S. Kom) *penyabar dan paling pinter cari duit*, dan si Chuiy (Dwi Retno Ningsih, S. Kom) yang *bak air tenang menghanyutkan*, “tangannya lebih banyak *ngomong* ketimbang mulutnya, dia penulis keren”.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan semuanya. *Amin Ya Rabbal ‘Alamin*.



Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 18 April 2017

**Pipin Armita, S.Ud**  
**1520510034**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN. ....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING. ....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN. ....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Metode Analisis Data .....	24
H. Sistematika Pembahasan .....	25
 <b>BAB II : GENEALOGI NAHDHATUL ULAMA DAN BAHTSUL</b>	
<b>MASAIL .....</b>	<b>28</b>
A. NU Menurut Para Peneliti .....	28
B. Bahtsul Masail .....	41
1. Sejarah Pembentukan Bahtsul Masail. ....	41
2. Peserta Bahtsul Masail.....	44
3. Bahtsul Masail: Proses dan Metode.....	44
C. Bahtsul Masail Pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015.....	48
1. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Muktamar. ....	48
2. Peserta Muktamar dan Bahtsul Masail .....	50
3. Materi Muktamar.....	52
 <b>BAB III : METODE ARKEOLOGIS NU DALAM MENETAPKAN</b>	
<b>HADIS SEBAGAI HUJJAH .....</b>	<b>57</b>
A. Metode Pemahaman Hadis Sebagai Hujjah.....	57
B. Metode Pemahaman Hadis Sebagai Hujjah dalam Bahtsul	
Masail Muktamar NU ke-33 tahun 2015. ....	60
1. Hadis Tentang Mengingkari Janji Bagi Pemerintah. ....	66
2. Hadis Hukum Asuransi BPJS. ....	69
3. Hadis Advokat dalam Tinjauan Fikih. ....	68

4. Hadis Khashais Ahlu Sunnah wal Jamaah an-Nahdhiyyah.....	74
5. Hadis Hukuman Mati dan HAM.....	79
6. Hutang Luar Negeri .....	81
7. Hadis Perlindungan Umat Beragama Menurut Undang-undang.....	84
8. Hadis Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah (Perbaikan PP. NO. 55 tahun 2007).....	88
9. Hadis Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Murah dan Berkualitas. ....	92
10. Hadis SDA untuk Kesejahteraan Rakyat.....	98

**BAB IV : RELASI KUASA NU DALAM PENETAPAN HADIS SEBAGAI HUJJAH DALAM BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR NU KE-33 TAHUN 2015 ..... 110**

A. Pendekatan Genealogis NU: Melacak Akar Pemikiran NU....	110
1. Pendiri ( <i>Founding Fathers</i> ) NU.....	110
2. Pesantren Sebagai Model dan Pusat Peradaban NU .....	112
B. Metode Arkeologi NU dalam Menetapkan Hadis Sebagai Hujjah.....	115
C. Relasi Kuasa NU dalam Penetapan Hadis Sebagai Hujjah dalam Bahtsul Masail Muktamar NU ke-33 tahun 2015 .....	120
1. Hadis Tentang Mengingkari Janji Bagi Pemerintah. ....	121
2. Hadis Hukum Asuransi BPJS. ....	128
3. Hadis Advokat dalam Tinjauan Fiqh.....	135
4. Hadis Khashais Ahlu Sunnah wal Jamaah an-Nahdhiyyah.....	138
5. Hadis Hukuman Mati dan HAM.....	149
6. Hadis tentang Utang Luar Negeri. ....	154
7. Hadis Perlindungan Umat Beragama Menurut Undang-undang.....	157
8. Hadis Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah (Perbaikan PP. NO. 55 tahun 2007).....	162
9. Hadis Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Murah dan Berkualitas. ....	170
10. Hadis SDA untuk Kesejahteraan Rakyat.....	178

**BAB V : PENUTUP ..... 187**

A. Kesimpulan .....	187
B. Saran-Saran .....	188

**DAFTAR PUSTAKA ..... 189**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 194**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nahdhatul Ulama (NU)<sup>1</sup> merupakan salah satu organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyyah*) terbesar di Indonesia. Dengan eksistensinya itu, banyak hal menarik yang patut dilirik dalam tubuh NU berkenaan dengan pemahaman keagamaan yang dimilikinya. Seperti sikap NU yang berkomitmen menjaga tradisi dalam mazhab atau khazanah *turaṭs qadim* yang disebut dengan kitab *al-mu'tabar*,<sup>2</sup> yang pada tataran selanjutnya mempengaruhi sikap NU terhadap al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Dalam hal ini NU menilai, beristinbath hukum langsung kepada al-Quran dan hadis tanpa memperhatikan kitab fikih merupakan hal yang tidak dibenarkan,<sup>3</sup> sekalipun hal tersebut belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam Bahtsul Masail NU tidak jarang merujuk langsung pada al-Quran dan hadis<sup>4</sup> dalam mengistinbath suatu hukum.

Sikap dan tradisi hadis NU terlihat jelas dalam Bahtsul Masail yang menjadi wadah ijtihad NU yang disebut Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Lembaga ini berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai persoalan keagamaan yang timbul di masyarakat dengan tiga prosedur,

---

<sup>1</sup> Selanjutnya disebut dengan NU.

<sup>2</sup> Lihat "Bahtsul Masail Al-Diniyah Al-Waqi'iyah", Keputusan Mukhtamar NU Ke-1 tentang *Hukum Bermazhab*, (Surabaya, 21 Oktober 1926 M).

<sup>3</sup> Keputusan Mukhtamar NU Ke-11, tentang *Berhukum Langsung Dengan Al-Quran dan Hadis*, (Banjarmasin, 9 Juni 1936 M).

<sup>4</sup> Salah satu contohnya dikemukakan oleh Ahmad Zaro dalam Mukhtamar XXIII di Solo, Desember 1962 tentang hukum transplantasi organ tubuh. Lihat Ahmad Zaro, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), 260-264.

yakni *taqrir jama'iy*, *ilḥaq*, dan *istinbat*<sup>5</sup> untuk warga nahdhiyyin dan organisasi (*jama'iyyah*), serta pemikiran bagi kemaslahatan bangsa Indonesia secara umum.<sup>6</sup> Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai tingkatan kepengurusan NU, mulai dari tingkat Pengurus Besar (PB) hingga Pengurus Anak Ranting.<sup>7</sup>

Dalam berbagai kumpulan Bahtsul Masail, NU senantiasa mencantumkan hadis nabi di dalamnya (walaupun ada beberapa masalah yang tidak dicantumkan). Paling tidak dari hadis-hadis yang dicantumkan tersebut membuktikan bahwa hadis merupakan sebuah *term* penting dalam aktifitas istinbath hukum dalam tradisi Islam khususnya di kalangan NU. Oleh karena itu, mengkaji hadis dalam tradisi dan pemahaman NU merupakan hal yang menarik dan unik. Keunikan ini juga dapat dilihat pada usaha NU memposisikan hadis sebagai hujjah saat memutuskan persoalan-persoalan agama kontemporer dalam bahtsul masail.

Jika usaha tersebut dilihat dengan teori Foucault, maka pilihan NU tentang hadis yang dipilih sebagai hujjah merupakan bentuk relasi kuasa (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*). Dalam teori relasi kuasa dan pengetahuan-nya Foucault, ketika sebuah wacana atau diskursus dilahirkan, maka diskursus itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya. Wacana itu juga dikonstruksi berdasarkan aturan-

---

<sup>5</sup> Muhib Rasyidi, "Membumikan Teks Agama Ala Nahdhatul Ulama", *Journal Of Quran and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 1 (2013), 25.

<sup>6</sup> *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdhatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016), xii.

<sup>7</sup> Dalam Bab VI Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU di Jombang Jawa Timur menjelaskan bahwa Struktur dan Perangkat Organisasi NU Terdiri Dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting. Lihat. *Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 ....*, 28.

aturan (*episteme*) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan kekuasaan. Dengan demikian, melihat relasi tersebut, sebagai organisasi yang memiliki wadah istinbath hukum (seperti Bahtsul Masail) tentu merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Bisa jadi problematika ini memungkinkan terjadinya pergulatan hadis dengan realitas sosial masyarakat NU yang luas. Pergulatan ini pada tataran selanjutnya diregulasi oleh adanya relasi kuasa dan pengetahuan dalam tubuh NU yang tertuang dalam Bahtsul Masail.

Dengan berbagai persoalan agama kontemporer yang dibahas, hadis diminta berbicara, mengomentari dan pada akhirnya memberi keputusan terhadap suatu permasalahan yang muncul baik untuk membenarkan, membiarkan, menolak, atau bahkan menyalahkan.<sup>8</sup> Akibatnya, keberadaan hadis yang melintasi waktu dan mengiringi berbagai realitas yang muncul adakalanya menyebabkan pemahaman hadis terjerembab dalam kawasan-kawasan hitam<sup>9</sup> atau bahkan menjadi ‘korban’ dari satu kepentingan kelompok atau penguasa tertentu.

Dengan demikian, mengetahui bagaimana mekanisme penetapan hadis yang digunakan sebagai hujjah sangat diperlukan. Untuk memberikan gambaran dan tinjauan lebih jauh mengenai hal ini, maka penulis tertarik untuk meneliti Bahtsul Masail Pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015 sebagai objek kajian dengan analisis pendekatan genealogi dan metode arkeologi yang diusung Foucault dalam teorinya ‘relasi kuasa dan pengetahuan’. Setelah problematika dianalisis, akan terlihat bagaimana diskursus-diskursus keagamaan yang telah

---

<sup>8</sup> Duwi Harono, “Hadis dalam Fatwa dan Permasalahan Sosial Kontemporer (Analisa Pemahaman Hadis MUI dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Di Padang Panjang Tahun 2009)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, 2.

<sup>9</sup> Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 9.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأَ بِمَاؤُهُمْ وَهُمْ بِدِّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى<sup>11</sup> بِمَتْنِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا نُوْ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. Dari Ali ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Darah kaum mukminin itu sederajat (tidak dibedakan antara darah orang kaya dan miskin),



pendidikan agama di sekolah berdasarkan perbaikan PP No. 55 tahun 2007, NU menjadikan hadis tentang anjuran memberi nama yang baik dan mendidik anak<sup>12</sup>, serta hadis yang menyatakan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan suci sebagai dalilnya.<sup>13</sup>

Berangkat dari problematika ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana metode yang digunakan oleh NU dalam menetapkan hadis-hadis tersebut hingga menjadi dalil dasar penetapan sebuah hukum dalam persoalan-persoalan agama kontemporer dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 ini. Dalam mukhtamar ini, NU membahas materi yang telah disiapkan oleh panitia yang terbagi dalam 6 (enam) komisi, yaitu: (a) Komisi *Bahtsul Masā'il ad-Diniyyah al-Waqi'iyah*, (b) Komisi *Bahtsul Masā'il ad-Diniyyah al-Mauḍlu'iyah*, (c) Komisi *Bahtsul Masā'il ad-Diniyyah al-Qanuniyyah*, (d) Komisi Organisasi, (e) Komisi Program, dan (f) Komisi Rekomendasi<sup>14</sup>.

Dari enam materi di atas, penulis memfokuskan kajian pada butir a, b, dan c saja, karena hanya tiga bagian ini yang mengutip hadis sebagai hujjah sedangkan tiga materi selanjutnya lebih bersifat rekomendasi atau persoalan

---

*mereka adalah pelindung terhadap orang selain mereka. orang-orang yang dipandang rendah dari mereka boleh memberikan perlindungan (pada orang kafir yang minta perlindungan). Ingatlah tidak boleh seorang mukmin dibunuh sebab (membunuh) orang kafir dan (tidak boleh dibunuh) orang (kafir) yang telah mengikat janji selama masa perjanjiannya". (HR. an-Nasai). Lihat, Hasil-Hasil Mukhtamar NU ke-33....., 217.*

<sup>12</sup> عن ابن عباس قال قال رسول الله ص.م ((من ولد له ولد فاليحسن اسمه وأدبه. Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa melahirkan seorang anak maka berilah nama yang baik dan mendidiknya" (HR. al-Baihaqi). Lihat, Hasil-Hasil Mukhtamar NU ke-33....., 427.

<sup>13</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

"Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Nabi SAW bersabda: setiap anak terlahir dalam keadaan bersih (fitriah), kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi" (HR. al-Bukhari dan Muslim). Lihat, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, Hasil-Hasil Mukhtamar NU ke-33....., 227.

<sup>14</sup> Lebih jelasnya lihat *Panduan Acara Mukhtamar Ke-33 Nahdhatul Ulama*, (Jakarta: Panitia Nasional Mukhtamar Ke-33 Nahdhatul Ulama, 2015), 12.

*intern* NU yang tidak berkaitan dengan persoalan istinbath hukum ataupun posisi hadis sebagai hujjah. Dalam penelusuran penulis, dalam tiga materi ini setidaknya ada 82 hadis yang digunakan sebagai dasar pengambilan hukum. Sedangkan hadis yang akan ditinjau lebih jauh terkait relasi kuasa dalam penetapan hadis sebagai hujjah ada 36 hadis, yaitu hadis-hadis yang dikutip langsung dalam kitab hadis. Sehingga dari sekian banyak hadis tersebut dianggap mampu menjawab problem akademik yang sedang diteliti. Tiga materi ini membahas persoalan-persoalan sebagai berikut:

- a. Komisi *Baḥṭsul Masā'il ad-Diniyyah al-Waqi'iyah* membahas masalah-masalah; hukum mengingkari janji bagi pemimpin, hukum asuransi BPJS, Pemakzulan (pemberhentian) pemimpin, advokad membela koruptor, eksploitasi alam secara berlebihan, dan hukum alih fungsi lahan.
- b. Komisi *Baḥṭsul Masā'il ad-Diniyyah al-Mauḍlu'iyah* membahas masalah; metode istinbath hukum (*bayāni, qiyāsi* dan *maqāshidi*), *khaṣḥaiṣ ahlus sunnah wal jamā'ah*, pasar bebas, hutang luar negeri, hukum mati dalam perspektif HAM, dan asas praduga tak bersalah.
- c. Komisi *Baḥṭsul Masā'il ad-Diniyyah al-Qanuniyah* membahas masalah; perlindungan umat beragama melalui undang-undang, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah (PP No. 55/2007), penyelenggaraan pilkada yang murah dan berkualitas, sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, memperpendek masa tunggu calon jamaah haji dan pengelolaan keuangan haji, perlindungan TKI dan pencatatan nikah bagi mereka yang beragama Islam, dan Perbaikan pengelolaan BPJS Ketanagakerjaan dan Kesehatan.

Minimnya pembahasan tentang hadis dalam hasil keputusan bahtsul masail, khususnya pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015 tentunya menjadikan kajian semakin menarik dan relevan apalagi bila ditinjau dari sisi kebaruan (*update*) persoalan yang dibahas. Dalam ranah hadis, hal ini juga membuktikan bahwa sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Quran, hadis menjadi bahasan kajian yang selalu menarik untuk diteliti<sup>15</sup>, dan tiada henti-hentinya memberikan pengaruh dan juga telah mewarnai masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi warga nahdhiyyin maupun umat Islam secara umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, berikut permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana genealogi pemahaman NU terhadap hadis yang dijadikan sebagai hujjah dalam keputusan Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015?
2. Bagaimanakah metode arkeologis NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah dalam keputusan Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015?
3. Bagaimana bentuk relasi kuasa NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah dalam keputusan Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan hadis dan metode ulama-ulama NU dalam Bahtsul Masail ke-33 tahun 2015 khususnya tentang persoalan-persoalan agama yang kontemporer. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 233.

1. Mendeskripsikan genealogi NU dalam memahami hadis yang dijadikan sebagai hujjah dalam keputusan Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015
2. Mendeskripsikan metode arkelogis NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah dalam keputusan Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 di Jawa Timur tahun 2015.
3. Mendeskripsikan bentuk relasi kuasa NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah dalam keputusan Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis kajian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan Islam khususnya dalam bidang hadis.
2. Dalam tataran praktis bermanfaat dalam memahami sikap keberagaman NU khususnya mengenai metode penetapan hadis sebagai hujjah.
3. Menjadi bahan evaluasi terhadap kehujjahan hadis yang digunakan dalam keputusan Bahtsul Masail NU.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Secara umum, keputusan Bahtsul Masail NU telah banyak diteliti oleh berbagai kalangan dengan corak penelitian yang beragam, baik itu dalam ranah sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Di antaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, kajian yang dilakukan oleh Ahmad Zaro dengan judul *Tradisi intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Dalam penelitian ini, Ahmad Zaro mengungkapkan bagaimana mekanisme dan kegiatan Bahtsul Masail NU, terutama mengenai *kutub al-Mu'tabar* yakni kitab-kitab fikih mazhab yang dijadikan sebagai rujukan dalam Bahtsul Masail tersebut (lebih rincinya penulis

paparkan pada bab II).<sup>16</sup> *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Radino dengan judul *Metode Ijtihad NU Kajian terhadap Bahtsul Masail NU Pusat*.<sup>17</sup> Tulisan ini difokuskan untuk melihat bagai metode ijtihad yang digunakan NU dalam menetapkan sebuah hukum yang tertera dalam Bahtsul Masail. *Ketiga*, karya Hibatun Wafiroh tentang *Bahtsul Masail NU Tentang Perempuan; Studi Terhadap Ijtihad Ulama NU*. Sebagaimana tercermin dari judulnya, Hibatun Wafiroh dalam karyanya ini memfokuskan kajian terhadap Ijtihad NU dalam Bahtsul Masail yang berbicara tentang perempuan (gender);<sup>18</sup> dan masih banyak penelitian lainnya.

Di samping penelitian-penelitian di atas, penulis juga menemukan beberapa penelitian yang lebih fokus pada ranah hadis-hadis NU, khususnya tentang metode pemahaman hadis dalam Bahtsul Masail. Dalam rentang waktu 2007 sampai tahun 2015 penulis menemukan lima penelitian, sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian Sarwanih pada tahun 2007 dengan karyanya, *Telaah Terhadap Paradigma, Posisi, dan Kualitas Hadis dalam Hasil Keputusan Mukhtar NU Ke-1 Di Surabaya Tahun 1926*. Dalam penelitian ini Sarwanih mengungkapkan bagaimana paradigma, dan posisi hadis yang digunakan NU dalam hasil keputusan Mukhtar NU pertama di Surabaya. Dari penelitian ini diketahui bahwa hadis yang digunakan NU dalam istinbath hukum adalah hadis

---

<sup>16</sup> Lihat Ahmad Zaro, “Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Fiqh)”, Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

<sup>17</sup> Radino, “Metode Ijtihad NU Kajian Terhadap Bahtsul Masail NU Pusat”, *Tesis* IAIN Al-Raniry Banda Aceh, 1997.

<sup>18</sup> Hibatun Wafiroh, “Bahtsul Masail NU Tentang Perempuan; Studi Terhadap Hasil Ijtihad Ulama NU”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

*shahih* dan *dhoif*.<sup>19</sup> Dalam penelitiannya tersebut, Sarwanih lebih dominan berbicara tentang hadis-hadis yang digunakan pada Mukhtamar NU ke-1 tahun 1926 dari sisi kualitasnya.

*Kedua*, karya Shohibul Adib pada tahun 2009 dengan judul *Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama (Telaah Terhadap Hasil Bahtsul Masail NU 1926-2004)*. Dalam penelitian ini Shohibul Adib mencoba meneliti bagaimana pemahaman hadis di kalangan NU. Shohibul Adib memfokuskan kajiannya hanya pada domain hadis Nabi yang digunakan NU dalam Bahtsul Masail tingkat nasional yang diselenggarakan dalam Kongres atau Mukhtamar, Konferensi Besar, Rapat Dewan Partai, maupun Musyawarah Nasional Alim Ulama dalam kurun waktu 1926-2004. Shohibul Adib melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif analitik dengan analisa dan interpretasi dan didukung dengan pendekatan sosio-historis dan hermeneutik sebagai sistem penafsiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut NU membahas 458 masalah. Dari masalah-masalah tersebut, NU mencantumkan 75 hadis sebagai dasar penetapan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hadis dalam tradisi Bahtsul Masail NU menempati kedudukan yang penting dengan tradisi nalar yang beragam, yakni *Qauliy*, *ilhaqy* dan *manhaji*. Adapun metode pemahaman yang digunakan paling banyak adalah metode *muqarin*, sedangkan sisanya menggunakan metode *tahlili* dan *ijmali*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sarwanih, "Telaah Terhadap Paradigma, Posisi, dan Kualitas Hadis dalam Hasil Keputusan Mukhtamar NU Ke-1 Di Surabaya Tahun 1926", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>20</sup> Shohibul Adib, "Pemahaman Hadis Dalam Tradisi Nahdlatul Ulama (Telaah Terhadap Hasil Bahtsul Masail NU 1926-2004)", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuhendri tahun 2013 dengan judul: *Pemahaman Hadis-hadis Rukyat Menurut Muhammadiyah dan NU*. Penelitian ini merupakan studi komparatif antara Muhammadiyah dan NU. Eka Yuhendri memfokuskan mengkaji bagaimana pemahaman hadis dari kedua ormas ini yakni Muhammadiyah dan NU dalam memahami hadis-hadis nabi yang berkaitan dengan rukyat dengan pendekatan fikih dan ushul fikih. Penelitian ini merupakan respon penulis terhadap fenomena perbedaan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal tidak diragukan bahwa setiap ormas menggunakan dalil yang sama, khususnya hadis-hadis rukyat. Dari penelitian ini diketahui bahwasanya hal ini disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan dalam memahami hadis Nabi. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam rangka memahami hadis-hadis rukyat, Muhammadiyah menggunakan metode 'hisab' dan Nahdlatul Ulama menggunakan 'rukyaat disertai 'imkan rukyat'. Dengan demikian untuk mencari solusinya, penulis menilai bahwa hisablah yang relevan untuk penyusunan kalender hijriah agar dapat saling mengisi satu sama lain mengingat kedua metode ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.<sup>21</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Umi Aflaha dengan judul: *Kajian Hadis dalam Ormas-ormas Islam di Indonesia (Analisa Pemahaman NU dan Muhammadiyah Terhadap Hadis-hadis Misoginis)*. Umi Aflaha mengungkapkan bahwasanya perbedaan pemahaman terhadap teks hadis disebabkan oleh perbedaan latar belakang dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing orang, golongan dan ormas-ormas yang ada. Sebagaimana judulnya, Umi Aflaha dalam

---

<sup>21</sup> Eka Yuhendri, "Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat Menurut Muhammadiyah dan NU", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

penelitiannya ini berusaha meneliti bagaimana pemahaman ormas-ormas yang ada di Indonesia khususnya NU dan Muhammadiyah terhadap teks hadis Nabi tentang hadis misoginis dan bagaimana implikasinya terhadap sikap dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan. Dari penelitian ini diketahui bahwasanya setiap ormas memiliki pemahaman yang berbeda. Muhammadiyah cenderung melakukan reinterpretasi terhadap hadis-hadis tersebut sehingga dinilai lebih relevan dengan konteks masa kini, sementara NU dinilai cenderung tetap pada interpretasi ulama terdahulu sehingga menghasilkan makna yang kaku dan terkesan bias gender.<sup>22</sup> Dalam paparan ini, terlihat jelas bahwa ruang lingkup kajian yang dilakukan masih terbatas pada hadis-hadis misoginis saja.

*Kelima*, penelitian Alfi Nuril Hidayah pada tahun 2015 dengan judul *Metode Pemahaman Hadis NU dan Muhammadiyah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya silang pendapat antara NU dan Muhammadiyah terhadap beberapa persoalan yang menyangkut pemahaman teks hadis. Di antaranya adalah hadis *hisab* dan *ru'yah*, *istighasah*, *tawassul*, *talqin* dan *qunut*. Dengan adanya fenomena tersebut, Alfi Nuril Hidayah mencoba mengupas akar permasalahannya dengan mencari bagaimana aplikasi metode pemahaman hadis pada kedua ormas tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang signifikan, peneliti menggunakan metode perbandingan dan sosiologis-hermeneutis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perbedaan tersebut tercipta karena adanya perbedaan perangkat metode yang digunakan serta disebabkan oleh perbedaan

---

<sup>22</sup>Umi Aflaha, "Kajian Hadis Dalam Ormas-Ormas Islam Di Indonesia (Analisa Pemahaman NU dan Muhammadiyah Terhadap Hadis-hadis Misoginis)", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.



sifat paradigmatik. Dalam memahami sebuah hadis Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan kontekstual (dalam hadis hisab dan qunut) serta paradigma rasionalis (dalam hadis *talqin*, *istighatshah*, dan *tawassul*). Sedangkan NU cenderung menggunakan metode tematik dengan pendekatan tekstualis serta menggunakan paradigma literalis-objektif.<sup>23</sup>

Beberapa penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, walaupun tidak dapat dipungkiri adanya kesamaan pada sisi-sisi tertentu. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menyentuh ranah yang belum dijangkau pada penelitian sebelumnya dengan fokus kajian Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015 tentang hadis-hadis yang dijadikan hujjah yang pada kajian-kajian sebelumnya belum dibahas sama sekali.

Dalam sistem kerjanya penelitian ini juga jelas berbeda dengan yang sebelumnya, karena penulis mengarahkan tulisan ini pada metode yang dilakukan oleh ulama NU dalam menentukan dalil-dalil hadis pada perkara-perkara kontemporer dengan teori dan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik (*theoretical framework*) dalam penelitian ini merupakan alat bantu yang berfungsi untuk melihat permasalahan penelitian secara objektif. Sesuai dengan topik penelitian ini, yang dititikberatkan kepada Bahtsul Masail,

---

<sup>23</sup> Alfi Nuril Hidayah, "Metode Pemahaman Hadis Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU), *Skripsi* IAIN Tulung Agung, 2015.

maka penulis menggunakan teori relasi kuasa (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari Michel Foucault sebagai pisau analisis.

Dalam teori ini, ada dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan, yakni; pendekatan ‘genealogi’ dan metode ‘arkeologi’. Istilah genealogi merupakan istilah yang beliau pinjam dari gurunya Nietzsche, sedangkan istilah ‘arkeologi’ merupakan orisinil pemikirannya. Terkait dua istilah ini, Foucault menjelaskan dalam karyanya ‘*Truth and Power*’ bahwa; *pertama*, kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan. *Kedua*, ‘kebenaran’ selalu terhubung dan ada di dalam relasi dengan sistem kuasa yang menghasilkan dan mempertahankannya. Foucault selalu terkait dengan efek-efek kuasa yang dipengaruhi dan disebarluaskannya. Hipotesis pertama merupakan hipotesis ringkas Foucault tentang metode arkeologinya, sedangkan hipotesis kedua mengenai pendekatan genealoginya.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, menurut Foucault, ketika sebuah wacana atau diskursus dilahirkan, maka diskursus itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya. Wacana itu juga dikonstruksi berdasarkan aturan-aturan (*episteme*) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan kekuasaan. Foucault menempatkan kebenaran rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, dan lain sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan.

---

<sup>24</sup> Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Moechtar Zoerni, (Yogyakarta: Qalam, 2002), viii.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antar berbagai kekuatan. Hal ini terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.<sup>25</sup> Sehingga, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.<sup>26</sup>

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti hadis-hadis dalam Bahtsul Masail pada muktamar NU ke-33 tahun 2015, karena sesuai dengan pendapat Geoff, bahwa ada banyak versi dan sudut pandang dalam merumuskan ide Foucault tentang kekuasaan, salah satunya pada lembaga biasa yang tersebar di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan manusia setiap hari. Teori Foucault tentang kekuasaan dinilai relevan untuk dijadikan kacamata khususnya untuk melihat relasi kuasa NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015.

Dalam karyanya "*The Archeology Of Knowledge*", Foucault juga menjelaskan bahwa antara relasi kuasa dan pengetahuan akan menghasilkan satu istilah yang disebutnya sebagai 'diskursus'. Diskursus dalam perspektif Foucault merupakan konsep kunci dalam falsafah modern yang melihat pentingnya sejarah dan waktu di dalam perbincangan tentang bahasa dan prakteknya. Dalam hal ini,

---

<sup>25</sup>Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000), 144.

<sup>26</sup>Steven Best dan Douglas Kellner, *Teori Postmodern: Interogasi Kritis*, terj. Indah Rohmani, (Malang: Boyan Publishing, 2003), 40.

sejarah tidak lagi sekedar mengkonotasikan rangkaian, urutan, evolusi atau kontinuitas, akan tetapi lebih kompleks dari itu. Dalam karyanya, Foucault menjelaskan sejarah dalam konteks diskontinuitas, bukan kontinuitas. Baginya, dalam rentang waktu adalah sesuatu yang terputus atau kontradiktif. Dengan demikian, setiap peristiwa memiliki keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya.

Dengan demikian, untuk melacak hal tersebut setiap peristiwa meninggalkan jejak di belakangnya yang menentukan hubungannya dengan peristiwa sebelumnya. Dengan jejak-jejak tersebutlah, Foucault melihat apa yang disebutnya sebagai diskontinuitas. Pengetahuan implisit yang melekat dalam diskursus menentukan peristiwa-peristiwa, formasi dan pembentukan fisik serta perubahan dari satu diskursus ke diskursus lainnya. Keterputusan dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya menurut Foucault menghasilkan ‘diferensi’ atau perbedaan.

Dalam kerangka operasionalnya, paling tidak ada tiga pendekatan studi agama dalam perspektif foucauldian:<sup>27</sup>

1. Menginvestigasi praktek-praktek sosial termasuk agama yang akan menjadi sasaran investigasi. Investigasi diarahkan kepada praktek-praktek yang secara efektif menjadi wilayah relasi kekuasaan menghasilkan efeknya yang represif.
2. Mendeskripsikan bagaimana relasi kuasa bekerja lewat mekanisme yang disediakan oleh praktek-praktek sosial tersebut dan bagaimana relasi kuasa tersebut mengonstitusi, memproduksi dan memunculkan diskursus keagamaan.

---

<sup>27</sup> Rudi Harisyah Alam, “Perspektif Pasca-Postmodernisme dalam Kajian Keagamaan”, dalam M. Deden Ridwa (Ed), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2001), 99-100.

3. Menganalisis bagaimana diskursus-diskursus keagamaan yang telah diproduksi oleh relasi kuasa selanjutnya menopang dan menjustifikasi bekerjanya relasi-relasi kuasa tersebut.

Jadi, dalam perspektif studi agama, hal ini lebih mengarahkan perhatian kepada bekerjanya efek-efek kuasa yang negatif, seperti membatasi, mengucilkan dan merepresi sebuah interpretasi.<sup>28</sup> Dengan analisis foucauldian ini, perangkat tidak hanya dinilai menyatukan kehidupan sosial atau kekuatan koersif yang mensubordinasikan sekumpulan orang atas orang lain, melainkan proses yang membangun jalan bagi segala bentuk tindakan, hubungan sosial, dan tatanan sosial.<sup>29</sup> Kajian dengan pendekatan ini merupakan perpaduan antara perspektif studi agama atau *cultural studies* dan kritis yang mempunyai keberpihakan pada nilai dan komitmen pada perubahan struktur relasi sosial yang bersifat hegemonik-dominasi.<sup>30</sup>

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan ada tiga kata kunci utama dalam teori yang dijadikan sebagai pisau analisis, yaitu; pendekatan genealogis, metode arkeologi dan relasi kuasa dan pengetahuan.

#### 1. Genealogi NU; Melacak Akar Pemikiran Dalam Tubuh NU

Dalam kacamata Foucault, 'kebenaran' selalu terhubung dan ada di dalam relasi dengan sistem kuasa yang menghasilkan dan mempertahankannya. Foucault selalu terkait dengan efek-efek kuasa yang dipengaruhi dan disebarluaskannya.

---

<sup>28</sup> Shafwan Rozi, "Agama dan Post-Modernisme: Menelusuri Metodologi dan Pendekatan Studi-Studi Agama", *Jurnal Ilmu Ushuludin*, Vol. 1, No. 3 Tahun 2012, 237.

<sup>29</sup> M. Ridhah Taqwa, "Menyoal Praktek Kekuasaan di Arena Pendidikan Berbasis Keagamaan Suatu Perspektif Cultural Studies", dalam *Prosiding Simposium Nasional Mahasiswa Pascasarjana Tahun 2008: 100 Tahun Kebangkitan Nasional dalam Berbagai Perpektif*, (Yogyakarta, 16-17 Mei 2008).

<sup>30</sup> Shafwan Rozi, "Agama dan Post-Modernisme.....", 238.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana ‘kebenaran’ itu bisa dilegalkan menjadi sebuah ‘kebenaran’, melihat kembali sejarah munculnya sebuah sistem kuasa merupakan langkah awalnya.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan genealogis ini bermanfaat untuk melacak akar sejarah NU dan Bahtsul Masailnya. Penelusuran ini penulis mulai dari cikal-bakal kemunculan NU pada tahun 1926. Kemudian, dilanjutkan dengan melihat bagaimana Bahtsul Masail hadir dalam tubuh NU dan menjadi wadah istinbath. Dari dua sisi kesejarahan ini, terungkap bagaimana NU bisa berdiri sebagai sebuah sistem kuasa dan mempengaruhi orang-orang dalam ‘kekuasaannya’.

Di samping merujuk langsung informasi yang terungkap (diskursus) dari sejarah-sejarah perjalanan NU itu sendiri, penulis juga merujuk pada catatan-catatan yang telah dilakukan para peneliti NU yang penulis anggap penting untuk melacak hal-hal yang tidak terungkap (non diskursus) dalam kesejarahan NU.

Pendekatan genealogis ini juga penulis gunakan untuk melihat bagaimana penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap perkembangan-perkembangan NU mulai sejak didirikan hingga hari ini. Dalam konteks ini, melihat kembali jejak-jejak para peneliti sebelumnya bermanfaat untuk meneropong ulang ‘sepak terjang’ NU dari zaman ke zaman.

## 2. Arkeologi NU dalam Memahami Hadis Sebagai Hujjah

Metode arkeologi dalam perspektif Foucault menegaskan bahwa sebuah kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan. Dengan demikian,

sebuah relasi kuasa dan pengetahuan akan terbentuk dengan adanya sistem yang mengatur bagaimana produksi hingga distribusi tersebut dapat bekerja.

Dengan demikian, NU sebagai sebuah sistem kuasa tentunya memiliki aturan-aturan tertentu dalam mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi dan operasinya. Berkenaan dengan fokus penelitian ini, penulis mengarahkan metode arkeologi tersebut dalam melacak hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015. Dalam operasional kerjanya, dimulai dengan melihat setiap pembahasan yang mengutip hadis dalam keputusan tersebut. Selanjutnya, penulis meneliti bagaimana aturan-aturan yang berlaku dalam mengutip hadis yang dianggap relevan dengan materi pembahasan. Hal ini bermanfaat untuk melihat bagaimana mekanisme yang digunakan NU dalam mensinkronkan hadis-hadis yang dipilih sebagai hujjah.

### 3. Relasi kuasa NU dalam Menetapkan Hadis Sebagai Hujjah

Dengan pendekatan genealogi dan metode arkeologi sebuah wacana dilahirkan. Dengan lahirnya wacana tersebut maka akan terkuak bagaimana sebuah wacana itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya, dalam hal ini berarti ulama NU.

Tidak hanya itu, sebuah wacana juga dikonstruksi berdasarkan aturan-aturan (*episteme*) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan kekuasaan. Foucault menempatkan kebenaran rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, dan lain sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan yang disebut Foucault sebagai ‘relasi kuasa dan pengetahuan’.

Menurut teori Foucault untuk melihat bagaimana sebuah relasi kuasa dan pengetahuan ini beroperasi dapat dianalisa dengan tiga perspektif;<sup>31</sup>

1. Adanya wilayah dan teknik pengaturan kekuasaan. Teknik ini memusatkan perhatian pada bagaimana kekuasaan dilaksanakan sebagai sebuah permainan taktis dan strategis yang dilakukan dari titik mana saja yang tidak terhitung jumlahnya. Ia dapat berasal dari bawah, imanen hubungannya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja.
2. Ada teknik pemerintahan yang menghubungkan pengetahuan dan kekuasaan. Hal ini sering disebut dengan praktik pendisiplinan yang merupakan dimensi strategis kekuasaan yang diwujudkan sebagai *manuvern* normativitas, strategi integrasi, dan taktik produktivitas. Pendisiplinan merupakan sebuah kondisi ketika individu berada di bawah domain pengetahuan tertentu dan berada di bawah rezim dan hirarki tertentu. Pendisiplinan merupakan bentuk peningkatan ketaatan dan kesetiaan pada pengaturan dan pengorganisasian hubungan timbal balik yang mendasar, sehingga individu menjadi lebih canggih, rasional, dan ekonomis karena mereka selalu berada di bawah pengawasan.
3. Teknik pemerintah dengan menghubungkan diri dan kekuasaan. Teknik ini disebut sebagai praktik individualisasi. Foucault memberikan contoh praktik ini dengan menjelaskan dikotomi *gila* dan *waras*, *sakit* dan *sehat* di dalam diri mereka sendiri dan dari yang lain.

---

<sup>31</sup>Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Pengetahuan, Michel Foucault, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 51-52.

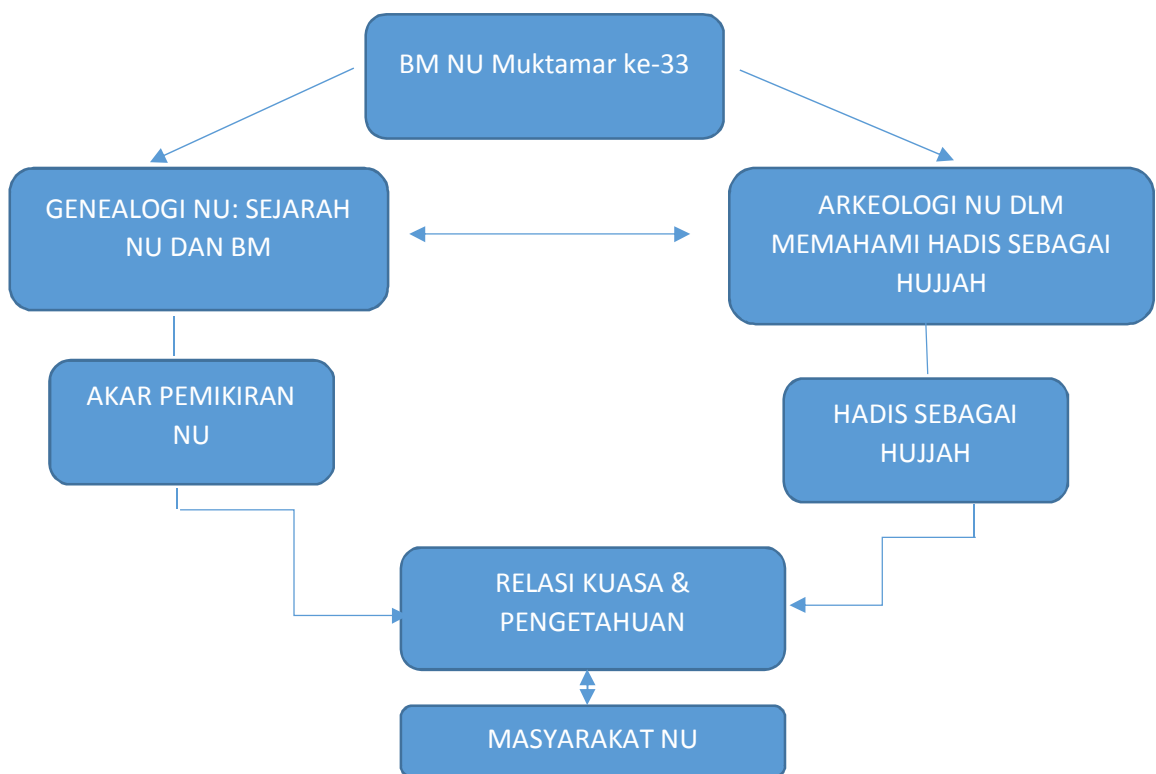


Dari tiga komponen ini; pengaturan kekuasaan, praktik pendisiplinan, dan praktik-praktik individualisasi dalam hal penetapan hadis sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015 dapat dilihat sebagai relasi kuasa, yakni sebagai berikut:

1. Wilayah dan teknik pengaturan kekuasaan. Wilayah kekuasaan dibatasi dalam ranah NU, atau lebih tepatnya diberlakukan untuk meregulasi kaum nahdhiyyin. Dengan adanya wilayah dan teknik pengaturan kekuasaan Bahtsul Masail sebagai teks yang dinilai memiliki nilai 'kuasa' dapat mengatur dan memusatkan perhatian pada bagaimana kekuasaan dilaksanakan sebagai sebuah permainan taktis dan strategis yang dilakukan dari titik mana saja yang tidak terhitung jumlahnya. Hal ini tetap berlaku disadari maupun tidak oleh kaum nahdhiyyin.
2. Praktik pendisiplinan. Pada ranah ini, ulama NU akan mensinkronkan antara pengetahuan dan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendukung wilayah dan teknik pengaturan kekuasaannya. Sebagaimana penulis jelaskan di atas, bahwa hal ini merupakan dimensi strategis kekuasaan yang diwujudkan sebagai *manuvern* normativitas, strategi integrasi, dan taktik produktivitas. Hal ini ditunjukkan dengan otoritas Bahtsul Masail dalam menetapkan suatu hukum. Ulama NU, dalam hal ini sebagai orang yang berperan utama mendisiplinkan kaum nahdhiyyin akan meningkatkan ketaatan dan kesetiaan pada pengaturan dan pengorganisasian hubungan timbal balik yang mendasar, sehingga individu menjadi lebih canggih, rasional, dan ekonomis karena mereka selalu berada di bawah pengawasan.

3. Praktik individualisasi. Hal ini merupakan teknik pemerintah (ulama NU) dengan menghubungkan diri dan kekuasaannya. Membentuk satu kebenaran sesuai dengan perspektif mereka atau dalam bahasa Foucault, seperti ‘keinginan mereka’.

Untuk melihat lebih jelas bagaimana kerangka operasional teori Foucault dalam penelitian ini, berikut penulis gambarkan secara ringkas:



Pada ruang lingkup ini, teori relasi kuasa dan pengetahuan akan terlihat dalam diskursus hadis yang dipilih NU sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015. Sesuai dengan teori ini pula, tercermin bagaimana sebuah pengetahuan tidak pernah melampaui ‘rezim kebenaran dan kuasanya’ sendiri.

## F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber utama datanya,<sup>32</sup> serta wawancara sebagai pendukung. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan, teori atau doktrin dan pemikiran konseptual serta penulisan terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>33</sup> Sedangkan data wawancara digunakan untuk mengkonfirmasi dan klarifikasi data yang diperoleh dari pustaka tersebut. Wawancara dilakukan ketika data yang dibutuhkan tidak terpenuhi secara maksimal. Untuk mendapatkan informasi, penulis menemui sumber data langsung atau responden. Sedangkan teknik yang digunakan untuk wawancara adalah teknik seleksi sampel (*snowball sampling*), yaitu teknik wawancara terhadap beberapa individu yang potensial dan bersedia untuk diwawancarai.<sup>34</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, baik dari sumber tertulis maupun wawancara dengan tokoh Lembaga Bahtsul Masail. Kemudian dianalisa sesuai dengan teori yang digunakan sebagai alur berfikir. Data-data tersebut digolongkan kedalam sumber data yang terbagi menjadi dua; data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, data primernya adalah keputusan Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur tahun 2015 yang diterbitkan oleh Lembaga *Ta'lif wa Nasyr* PBNU. Sedangkan data sekundernya terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan NU, serta karya-karya lain yang menunjang penyusunan tesis ini nantinya.

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

<sup>33</sup> Mestetika Zad, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet Ke-XI, (Bandung: Alfabeta, 2010), 300.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisa genealogis wacana. Dalam pendekatan ini mencakup di dalamnya aspek hermeneutika dan genealogi. Aspek hermeneutika akan memfokuskan perhatiannya pada wacana tafsir, yakni melihat bagaimana relasi antara teks (*text*), mufassir (*author*), dan masyarakat pembaca (*reader*). Sementara, aspek genealogis digunakan untuk memperhatikan asal-usul atau hubungan sejarah antara kekuasaan, wacana, pengetahuan, dan kebenaran.<sup>35</sup>

### G. Metode Analisis Data

Setelah data-data dalam penelitian baik primer maupun sekunder terkumpul, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah mengolah data-data tersebut agar lebih terarah dan sistematis. Adapun tahap awal adalah mendata persoalan-persoalan agama yang kontemporer dalam Bahtsul Masail pada Mukhtar NU ke-33 tahun 2015 tersebut. Dalam Bahtsul Masail ini terdapat tiga bab yang mencantumkan hadis yaitu; (a) *Bahtsul Masāil ad-diniyah al-waqi'iyah*, (b) *Bahtsul Masāil ad-diniyah al-mauḍhu'iyah*, dan (c) *Bahtsul Masāil ad-diniyah al-qanuniyah*. Dari tiga bab ini, kemudian penulis memilih membatasi analisis relasi kuasa pada persoalan-persoalan yang mengutip hadis secara langsung dari kitab hadis. Adapun persoalan-persoalan tersebut adalah:

1. Hadis tentang hukum mengingkari janji bagi pemerintah
2. Hadis tentang hukum asuransi BPJS
3. Hadis advokat dalam tinjauan fiqh
4. Hadis tentang *khasāis ahlu sunnah wa al-jamā'ah an-nahḍhiyyah*

---

<sup>35</sup> Haryatmoko, "Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan: Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault", dalam *BASIS: Jurnal Bahasa dan Sastra Inggris*, No. 1, Januari-Februari 2002, 13.

5. Hadis tentang hukuman mati dan HAM
6. Hadis tentang utang luar negeri
7. Hadis tentang perlindungan umat beragama menurut undang-undang
8. Hadis tentang pelaksanaan pendidikan agama di sekolah
9. Hadis tentang penyelenggaraan PEMILUKADA
10. Hadis tentang sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, penulis melihat bagaimana metode yang digunakan NU dalam menetapkan hadis tersebut sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015. Hal ini dilakukan dengan membongkar unsur-unsur relasi kuasa dalam penetapannya melalui teori Foucault pada Bahtsul Masail tersebut.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Bab satu terdiri atas latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian untuk memastikan masalah apa yang akan diteliti. Pada bagian selanjutnya, dipaparkan pula kajian pustaka, yakni; kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini memiliki posisi penting dalam sebuah penelitian untuk mengetahui posisi peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian, dipaparkan pula kerangka teori dan metode penelitian dan diakhiri dengan gambaran tentang sistematika pembahasan.

Bab kedua sudah masuk pada tahap awal penelitian. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan genealogi NU dan Bahtsul Masail. Pada bab ini penulis menguraikan a) Kesejarahan NU dan NU

dalam perspektif peneliti; b) Hal-hal yang berkenaan dengan Bahtsul Masail, seperti sejarah, peserta, proses dan metode penetapannya; c) hal-hal yang berkenaan dengan Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015, seperti waktu dan tempat penyelenggaraan mukhtamar, materi dan peserta Bahtsul Masail.

Bab ketiga membahas tentang metode arkeologis NU dalam menetapkan hadis dalam keputusan Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015. Bagian ini terdiri dari; (a) Metode penetapan hadis sebagai hujjah (b) metode penetapan hadis sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015.

Bab keempat ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah; (a) Analisis genealogis NU terhadap hadis yang digunakan sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU tahun 2015 (b) Analisis arkeologis penetapan hadis yang digunakan sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015 (c) Analisis relasi kuasa NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail NU Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran, baik secara teoritis maupun praktis terkait metode penetapan hadis dalam keputusan Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis tentang relasi kuasa dalam penetapan hadis sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail Mukhtar NU ke-33 tahun 2015 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akar pemikiran NU jika ditinjau dengan pendekatan genealogi dapat dilihat dari dua hal; Sejarah pendiri (*founding fathers*) NU dan ruang lingkup tempat berdirinya NU. Dari dua kategori ini, penulis menemukan bahwa; *pertama*, pemikiran NU berawal dari keterpengaruhan ulama Haramain (Mekkah dan Madinah). *Kedua*, tradisi pesantren di Jawa juga turut andil dalam membentuk corak dan bangunan pemikiran dalam tubuh NU, khususnya tradisi kitab kuning sebagai referensi.
2. Ada dua metode arkeologi NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah Bahtsul Masail Mukhtar ke-33 tahun 2015; *pertama*, hadis yang dikutip dari kitab hadis. *kedua*, hadis yang dikutip dari non kitab hadis seperti kitab syarah, kitab tafsir, kitab fikih, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis menemukan 15 pembahasan yang mengutip hadis, dengan jumlah secara keseluruhan 82 hadis dengan rincian sebagai berikut; 36 dikutip langsung dari kitab hadis, dan 46 dikutip secara tidak langsung dari kitab syarah, kitab fikih, kitab tafsir, dan lain-lain.
3. Dengan analisis relasi kuasa maka penulis menemukan bahwa: bahwa; *pertama*, tiga pembahasan merupakan teknik pengaturan kekuasaan; yaitu hukum BPJS, penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang murah dan



berkualitas, dan SDA untuk kesejahteraan rakyat. **Kedua**, lima pembahasan lainnya merupakan praktik pendisiplinan, yaitu hukum mengingkari janji bagi pemerintah, advokat dalam tinjauan fiqh, hukuman mati dan HAM, perlindungan umat beragama menurut undang-undang, dan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. **Dan ketiga**, dua pembahasan praktik individualisasi, yakni khashais ahlu sunnah wa al-jama'ah dan utang luar negeri.

Dalam konteks ini, kemudian lahirlah sebuah wacana Bahtsul Masail yang kemudian dibaca oleh masyarakat NU sebagai *reader* dan merespon. Sedangkan dalam hal ini ulama NU berperan sebagai *author*. Dalam proses sosial penafsiran inilah secara nirsadar dan amat tersamar melekat beroperasinya kekuasaan. Muncul dan beroperasinya kekuasaan ini adalah akibat langsung dari adanya peran dan status kedua pihak di atas. Di sinilah yang dikatakan Foucault bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki, diperoleh, dirampas, atau diberikan, tetapi kekuasaan adalah strategis dalam sudut hubungan sosial yang bergerak dan tidak egalitarian.

## **B. Saran**

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal terkait berikut:

1. Hadis memiliki kedudukan penting dalam aktifitas istinbath hukum. Dengan demikian NU khususnya dalam Bahtsul Masail hendaknya lebih memperhatikan hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah.

2. Dalam penelitian ini penulis menilai belum adanya keseragaman pola penulisan Bahtsul Masail satu dengan yang lainnya. Dengan demikian penulis menyarankan agar tersebut diseragamkan agar pola Bahtsul Masail lebih teratur dan mudah dipahami oleh pembaca. Misalnya; perbedaan pola penyebutan hujjah dengan dasar pengambillah hukum, dalil, dasar penetapan dan lain lain; sebagian teks yang dikutip dari bahas asing khususnya Bahasa Arab sebagian disertai terjemahan sebagian yang lain tidak disertai terjemahan. Oleh karena itu, dengan menyertakan terjemahan dalam redaksi Bahasa Indonesia akan lebih memudahkan masyarakat dalam memahaminya, mengingat Bahtsul Masail memiliki relasi kuasa terhadap warga nahdhiyyin.
3. Kepada para peneliti khususnya dalam bidang hadis, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penelitian ini masih jauh dari ‘sempurna’. Dengan demikian, penulis menyarankan untuk melanjutkan penelitian ini agar lebih sempurna. Berkenaan dengan Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 ini masih banyak sisi dan sudut pandang yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'zāmi, Muḥammad Diyāu Rahman al-. *Mu'jam al-Muṣṭalah al-Hadīṣ wa Laṭā'if al-Asānīd*. Riyadh: Maktabah al-Aḍwā-u al-Salaf, 1999.
- A'zāmi, Muḥammad Muṣṭafa al-. *Dirāsāt Fi al-Hadīṣ al-Nabawī wa Tarikh Tadwīnihi*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmi, 1980.
- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdurrahman, Jamal. *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*. Solo: Aqwam, 2013.
- Abdurrazzak, Mu'jizad. "Hadis Hukuman Mati (Pendekatan Sistem Sosial Talcott Parsons)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.
- Abū Salim, Dalal Muḥammad. *Tarikh al-Sunnah al-Nabawīyyah al-Muṭahharah*. Kairo: Jāmi'atu Al-Azhār, 2006.
- Abū Zayd, Nasr Hamid. *Imam Syafi'i : Modernisme, Elektisme, Arabisme*, terj. Khoiron Nahdiyyin. Yogyakarta : LkiS, 1997.
- Ali, Muḥammad bin Mukrim bin. *Lisān al-'Arāb*. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi; Metode Dan Pendekatan*. Yogyakarta: Cesad YPI al-Rahmah, 2001.
- Amin, M. Masyur. *NU Dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996.
- Amir, Ari Yusuf *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Yogyakarta: Navila Idea, 2008.
- Ash-Shan'āni, Muḥammad bin Ismail al-Amir. *Subulu al-Salām Syarh Bulūgu al-Marām*. Jakarta: Dār Sunnah Press, 2014.
- Asqalāny, Aḥmad bin Ali bin Ḥajar al-. *al-Iṣābah fī Tamyiz as-Saḥābat*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah: 1995.
- ....., *Fathul Bāri Syarah Saḥih al-Bukhārī*, terj. Amiruddin, Jil. 35. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- ....., *Nuzḥat al-Naẓār*. Semarang: Maktabah Al-Munawwir, t.t.
- Azdy, Sulaiman bin al-Asy'ats Abū Daud al-Sijistāny al-. *Sunan Abū Daud*. ttp: Dār al-A'lām, 2003.
- Baghdādy, Alī bin Amr Abū al-Hasan al-Dāru al-Quthny al-. *Sunan Dār al-Quthny*, Vol. 3. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1966.
- Bāni, Muḥammad Nashiruddin. *Shahih Sunan At-Tirmizi al-*. terj. Fahcrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Baqā'i, Alī Nayif al-. *al-Ijtihād fī Ilm al-Hadīs wa Atharuhu fī Fiqh al-Islāmy*. ttp: *Dār Bashair al-Islāmiyah*, t.t.
- Barton, Greg and Greg Fealy (ed), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: Lkis, 2010
- Bayhāqy, Abu Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin Ali al-. *Sunan al-Bayhāqy*. Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Baz, 1994.
- Best, Steven dan Douglas Kellner. *Teori Postmodern: Interogasi Kritis*, terj. Indah Rohmani. Malang: Boyan Publishing, 2003.

- Bruinnessen, Martin Van. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Makna Baru*. Yogyakarta: Lkis, 1994.
- Busty, Muḥammad bin Ḥibban bin Aḥmad Abu Ḥatim al-Tāmimi al-. *Musnad Ibnu Ḥibban*, Vol. 1. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.
- Dārimy, Abdullah bin Abdurrahman Abu Muḥammad al-. *Sunan al-Dārimy*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arāby, 1407 H.
- Darajat, Zakiyyah *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustakam 2005.
- El-Posito, Jhon L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva Yn. Bandung: Mizan, 2001.
- Eriyanto. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Fadhl, Khaled Abu L. *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority And Women*. Oxford: One World, 2001.
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: Lkis, 2003
- Foucault, Michel. *Arkeologi Pengetahuan*. Terj. Moechtar Zoerni. Yogyakarta: Qalam, 2002.
- ....., *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu. Jakarta: Gramedia, 2000.
- ....., *The History Of The Sexuality*. New York: Vintage Books, 1990.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haidar, M. Ali. *Nahdhatul Ulama Dan Islam Di Indonesia, Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Hakim, Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-. *Mustadrak 'ala Shahihain*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub, 1990.
- HAM, Mushadi. *Evolusi Sunnah Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hamdani, Ihsan. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Haryatmoko. "Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan: Menelanjangi Mekanisme Dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault", *BASIS: Jurnal Bahasa dan Sastra Inggris*, no. 1 Januari-Februari 2002.
- Hasil-hasil Muktamar Ke-33 Nahdhatul Ulama*, Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016
- Hasyimi, Aḥmad. *Jawāhirul Balaghah al-Ma'āni Wa al-Bayāni Wa al-Ba'ādi*. Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutis*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hidayat, Qamaruddin (dkk.). *Mereka Bicara Pendidikan Islam; Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ida, Laode. *NU Muda; Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Recontruction Of Religious Throught In Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1981.

- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ismail, M. Syuhudi *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Ja'fy, Muḥammad bin Ismā'il Abū Abdullah al-Bukharī al-. *al-Jāmi'u al-Shaḥiḥ*. Mekkah: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998.
- Jamil, M. Mukhsin (dkk.). *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan NU*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Jamil, M. Mukhsin.(dkk.). *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis Dan NU*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Khamdan. *Studi Hadis Teori dan Metodologi (Kritik Terhadap Hadis-hadis Pendidikan)*. Yogyakarta: Idea Press, 2012.
- Khatib, Muhamad 'Ajjaj al-. *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahahu*. Beirut: Daar al-Fikri, 1981.
- Latief, Abdul. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2009..
- Ma'ruf, Arifin, "Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Konsepsi Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam PANGGUNG HUKUM: *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Maimun, Muḥammad Najih. *Aḥlu Sunnah Wal Jamā'ah Aqidah Syariat Amaliyah*. Jawa Tengah: Toko Kitab Al-Anwar, 2011.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT. Remaja Rosdaakarya, 2005.
- Marhiyanto, Bambang dan M. Syamsul Arifin. *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*. Solo: Buana Raya, 1998.
- Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU Setelah Ekmbali Ke Khittah 1926*. ttp: Erlangga, 1992.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Pendidikan Pengetahuan, Michel Foucault, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Maschab, Mashuri. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Masyuri, Aziz. *Masalah Keagamaan*. Jakarta: Qultummedia, 2004.
- Mubārakfury, Muḥammad bin Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-. *Tuhfatu al-Ahwaḥi Bi Syarhi Jamī'i al-Tirmidzi*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Munawwir, Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naisābūry, Muslim al-Hajjaj Abū al-Ḥusain al-Qusyairy al-. *Shahih Muslim*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Arāby, 2004.
- Naisabūry, Muḥammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim al-. *Mustadrak 'alā al-Shahihain*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

- Nasā'i, Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib Al-. *Sunan Al-Nasāi*. Beirut: Dār Ihya al-Turats al-Araby, t.t.
- Nata, Abudin *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nawāwi, *Syarh al-Nawāwi li Shahih Muslim An-, Bab Mā Yubabahu Bihi Dam al-Muslim*, Juz 6, 87.
- Panduan Acara Mukhtamar Ke-33 Nahdhatul Ulama.
- Pusat Bahasa DEPDIKNAS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Qardhawi, Yusuf Al-. *Anatomi Masyarakat Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Kaifa Nata'āmal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993.
- Qawuzainy, Abū Abdullah Muḥammad bin Yazid al-. *Sunan Ibnū Mājah*. Beirut: Daar al-Fikri, t.t.
- Quthub, Sayyid. *Ma'ālim Fī al-Ṭāriq*. Kairo: Muṣṭafa al-Bābi al-Halāby, 1962.
- Rahman, Budi Muanwar. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Rasyidi, Muhib. "Membumikan Teks Agama Ala Nahdhatul Ulama", *Journal Of Quran and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 1 2013.
- Ridwa, M. Deden. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2001.
- Rozi, Shafwan. "Agama Dan Post-Modernisme: Menelusuri Metodologi Dan Pendekatan Studi-Studi Agama", *Jurnal Ilmu Ushuludin*, Vol. 1, no. 3 2012.
- Schacht, Joseph. *The Origin Of Muhammadan Jurisprudence*, terj. Joko Supomo. Yogyakarta: Insan Madani, 2010.
- Shan'āny, Muḥammad bin Isma'il al-Amir al-. *Subulu al-Salām Syarh Bulūgu al-Marām*. Jakarta: Dār Sunnah Press, 2014.
- Shiddiqie, Hasbi al-. *Mutiara Hadis*, Jil.I VI. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Siba'i, Mustafa al-. *Al-Sunnah wa Makānuha fī Tasyri' al-Islāmi*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Sughono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sula, Nuhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gemainsani Press, 2004.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta : Teras, 2008.
- Syaibāni, Abū Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḥilal bin Asad al-. *Musnad Imam bin Ḥanbal*, Vol. 9. Beirut: Ālimu al-Kutub, 1998.
- Syatibi, Abī Ishaq al-. *Al-Muwafaqāt Fi Uṣūli Syarī'ah*. Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah, t.t.
- Syūyūṭhi, Imām. *Tadrīb ar-Rōwi fī Syarh Taqrīb an-Nawawi*. ttp: Dār al-Ṭayyibah, t.t.
- Tamīmy, Muḥammad bin Hibban bin Aḥmad Abu al-Ḥatim al-. Vol. 15. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.
- Tampubolon, Maradut. *Membedah Profesi Advokat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

- Ṭabrāny, Abu Al-Qasim Sulaiman bin Aḥmad al-. *Mu'jam al-Ausath*, Vol. 6. Mesir: Dār al-Haramain, 1415 H.
- Tirmīzi, Muḥ Muḥammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dhahhak al-. *Sunan al-Timīdzi*. Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ, t.t.
- ....., *al-Jāmi'u al-Ṣahih li-Tirmīzi*. Beirut: Dar Ihya al-Ma'rifah, 2002.
- Tolkhah, Imam. "Urgensi Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah", Dalam *Mereka Bicara Pendidikan Islam; Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ulwān, Abdullah Nashih. *Pedoman Mendidik Anak Dalam Islam*. Kuala Lumpur: Asy-Syifa, 1981.
- Ulya, "Hubungan Kekuasaan-Pengetahuan Dalam Pewacanaan Ulū Al-Amr QS. An-Nisā' (4): 59. Pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966". *Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.
- Umar, Nasharuddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2014.
- UU RI N0. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zainuddin, Muhadi dan Abdul Mustaqim. *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif Dan Historis*. Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002.
- Zaro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: Lkis, 1004.
- ....., *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Zuhairini, dkk., *Metodologi Pendidikan Agama*. Solo: Ramadhami, 1993.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberal", *ULUMUNA: Jurnal Studi Keislaman*, No.1 Juni 2012.
- Zuhri, Muhammad. *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **Lampiran 1:**

### **BIODATA NARASUMBER 1**

Tanggal wawancara : Selasa, 16 Mei 2016. Jam 11. 30- 13.00 WIB

Nama : HM. Anis Masduqi, Lc. Msi.

Tempat tanggal lahir : Sleman, 22 Januari 1981

Alamat : Krapyak Wetan, Panggung Harjo Sewon, Bantul, DIY

Pekerjaan : Dosen

No. HP : 0815 7877 2050

Riwayat Pendidikan :

S1 Universitas al-Azhar (2001-2006)

S2 UIN Sunan Kalijaga (2007-2010)

S3 UIN Sunan Kalijaga (2011-2017)

Jabatan dalam NU : Sekretaris LBM NU DIY

Turut Serta Dalam Bahtsul Masail:

- a. Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi'iyyah
- b. Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudhu'iyyah
- c. Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qanuniyyah
- d. Semua

## **Lampiran 2:**

### **BIODATA NARASUMBER 2**

Tanggal wawancara : Sabtu, 13 Mei 2016. Jam 13.00- 14.15 WIB

Nama : Fajar Abdul Bashir

Tempat tanggal lahir : Demak, 11 Februari 1976

Alamat : Ngeblak, RT. 05. Wijirejo, Pandak Bantul, Yogyakarta

Pekerjaan : Wiraswasta

No. HP : 0858 7898 4445

Riwayat Pendidikan :

S1 UIN Sunan Kalijaga (2010)

S2 MSI UII Yogyakarta (2015)

Jabatan dalam NU : Ketua LBM NU DIY

Turut Serta Dalam Bahtsul Masail:

- a. Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi'iyyah
- b. Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudhu'iyyah
- c. Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qanuniyyah
- d. Semua

### Lampiran 3:

Hasil Wawancara Bersama Gus Fajar Bashory

Tanggal Wawancara: Sabtu, 13 Mei 2017

Apa yang menjadi keberatan tim penguji waktu ujiannya mb?

*Tidak ada pak, sebenarnya tim penguji secara umum tidak keberatan. Hanya saja, pengujinya meminta penelitian ini ditambah dengan wawancara sebagai data pendukung. Hal ini terkait dengan teori yang saya gunakan sebagai analisisnya, teori Foucault tentang relasi kuasa dan pengetahuan. Dalam teori ini ada istilah diskursus (terungkap dalam teks) dan non-diskursus (yang tidak terungkap dari teks). Nah, untuk melihat hal yang tidak terungkap inilah yang saya butuh wawancara pak.*

*Pertama. Misalnya NU ketika bertanya bagaimana hukum mengingkari janji bagi pemerintah? NU menetapkan satu hadis sebagai jawabannya, yaitu hadis tentang golongan orang yang tidak akan diajak Allah bicara di hari kiamat. Nah, apa sebenarnya korelasi persoalan ini dengan hadis tersebut? Lalu saya menjawab, bahwa hadis tersebut ada korelasi dengan jawaban NU pada soal ke tiga dalam BM tsb. Apa hukum mentaati pemimpin yang mengingkari janji? Jawabnya, wajib. Makanya NU mengangkat hadis tsb.*

Tapi sampean tidak menyoroti satu masalah saja kan? Gini, ada gak hadis yang gak nyambung gitu?

*Ya pak, menurut bapaknya memang hadis-hadis tersebut gak ada korelasinya pak. Tapi ya menurut saya setelah di analisis itu ada. Tapi kalau dibaca judulnya memang gak nyambungkan pak. Hukum mengingkari janji...trus hadisnya golongan yang tidak diajak bicara di hari kiamat.*

*Pak kira-kira dalam penetapan sebuah hadis sebagai hukum itu, apakah ada hubungannya dengan korelasi NU dengan pemerintah misalnya, atau yang lain gitu pak? Dalam BPJS misalnya, kenapa mereka mendukung? Gitu..apakah ada hubungan nya kesana?*

Oh ya ya...saya paham kalau itu. Saya takutnya gini mb, memang ada hadis yang benar-bener gak nyambung gitu. Salah cetak,,kan namanya orang bisa aja salah cetak gitu. Namanya juga berkas banyak gitu, masuk ke sekretariat. Atau salah letak gitu...

*Hehe kalau itu tidak ada pak. Persoalannya memang masalah korelasi tadi pak, yang pertama.*

Mana-mana, ada disni? (membuka BM).

*Ada pak, masalah pertama hukum mengingkari janji tadi...BPJS juga ada 12 hadis pak.*

---

*Pak, ini ada data dari jogja itu berjumlah 36 (6x6).maksudnya gimana ya pak?*

Ini yang 36 itu peserta muktamarnya..bukan bahtsul masail, diakan per komisi. Komisi organisasi, komisi rekomendasi, komisi bahtsul masail..macam-macam tho..yang bahtsul masail tu dikit. Paling 2 klaw ndak tiga. Pak yamin, pak...saya. Cuma sya keluar waktu itu. Sama rais suriah...jadi 4. Ini ni peserta muktamar.

Jadi yang dari jogja 4 orang pak?

Rais suriah, BM nya 3. 6 itu artinya majelis, tadi sy katakan komisi. Jadi jogja mengirim 36 dengan keterangan masing-masing 6. Ya gitu...berarti yang masuk itu kemaren bukan 8, tapi 6 setiap komisinya. Rais syuriah, trus LBM. Jadi yang ikut bahtsul Masail itu 6. 6 ini komisi. Nah yang ini PCI (pengurus cabang international) itu dari luar negeri. Kyaknya gitu mb,..kalau saya tebak loo ya.

*Pertanyaan selanjutnya pak. Dalam menetapkan hadis sebagai hujjah itu NU punya standar kyk SOP gitu gak pak? Maksudnya gini, hadis-hadis yang dijadikan hujjah itu yang begini begini...gitu pak?*

Jadi begini, biasanya hadis-hadis yang dijadikan hujjah itu adalah hadis-hadis yang mencakup pemahaman secara umum. Kemudian ada beberapa hadis yang secara spesifik pada masalah-masalah itu. Itu yang pertama, makanya ada seolah-olah ada hadis yang gk nyambung. Gitu. Tapi jika dilihat dari sisi umum..itu ada kaitannya. Seperti tadi. Dikatakan, hadis diakhirat golongan ornag yang tidak diajak bicara di hari kiamat adalah orang yang membaiaat pemimpin gitu ya,,, nah itu kan kaitannya dengan hukum mentaati pemerintah. Nah itu, ada hadis umum dimunculkan dulu, kemudian baru hadis-hadis secara spesifik membahas hal tersebut.

Seperti kita lihat dalam fatwa mui,,,sama. Ayatnya umum dulu, hadis nya umum dulu,,,baru kemudian baru kata ulama-kata ulama gitu. Jadi caranya gitu, makanya seolah-olah gak ada korelasinya...tapi kalau dilihat secara umum. Ada. Misalnya, apa hukumnya orang memelihara tuyul? Ayat al-Quran yang dimunculkan adalah ‘athiu Allah wa la tusyriku bihi syaia”, nah iyakan? Itu umum dulu..taatilah Allah dan jangan kamu mensekutukannya...nah itu ayat umum dulu, urusannya dengan keyakinan. Bahwa tidak boleh menyekutukan Allah. kemudian dibawahnya...khusus, khusus khusus...baru smpai pada persoalan memelihara tuyul tadi. Baru dibahas.

*Jadi pola dalam penetapan hukumnya gitu ya pak? Dari umum ke khusus?*

Iya, dari umum dulu.ayat dan hadis umum dulu,,,baru khusus. Nah, khusus ini, di NU itu tidak begitu mengomentari hadis. jadi kapasitas LBM NU itu tidak

mengomentari hadis dan juga tidak mengomentari al-Quran. Karena apa? Karena al-Quran dan hadis itu sudah ada yang bahas, siapa? Para ulama. Jadi, kita itu tinggal mengikuti bagaimana pandangan para ulama terhadap ayat itu, hadis itu. Nah ulama itu, ulama dulu ya (ulama-ulama salaf). Bagaimana ulama-ulama salaf memandang hadis ini, bagaimana ulama salaf memandang ayat ini. Nah, ulama NU nanti langsung aj,,menurut ulama ini...gitu. jadi tidak menjelaskan proses pemahaman ulama, perbedaan ulama dalam memahami ayat dan hadis...itu kepanjangan. Paham ya? Jadi di sana begitu mekanisme penetapan hadis..ada hadisnya kita pasang,..kadangkan ada masalah tu yang gak ada hadis ya...nah cari ayat n hadisnya yang secara umum...nah lalu baru ambil bebrapa pendapat ulama tentang itu. Karena kita tidak punya kapasitas untuk menafsirkan al-Quran dan hadis. sampean tau imam bukhory? Dia juga tidak langsung menafsirkan hadis...tapi bermazhab syafii kaan gitu. Karena bukhori tidak punya kapasitas untuk menggali hukum dari hadis padahal dia adalah ahli hadis. nah gitu. Orang ahli al-Quran belum tentu ahli fiqh, belum tentu ahli hukum. Nah jadi itu yang terjadi di bahtsul masail begitu. Jadi tidak membahas...ayat ini dibahas, hadis ini dibahas,,tidak. Tapi langsung mengambil pendapat ulama tentang hadis tersebut. misalnya tentang BPJS,,misalnya. Ayat yang dimunculkan ayat *wa ta'awanu al albirri wa taqwa..nah apa hubungannya BPJS* dengan ta'awun dalam ayat ini?,, kemudian ada lagi disana hadis al-muslim akhu muslim..almuslim kalbunyan..yasyuddu ba'dhuhu ba'dha. Saling membantu gitukan? Apa korelasinya? Karena BPJS sama sekali tidak ada hadisnya. Jadi penetapan ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Justru, jikalau justru karna pemerintah itulah BPJS itu dibolehkan..no provides. BPJS kan no provides. Jadi tidak ada unsur bisnis disitu, kecuali asuransi-asuransi yang dipegang oleh perusahaan swasta..pasti ada provide nya..kalau ini nggak. BPJS ini diurus setiap bulan, dan dipanggil DPR setiap bulan. Eehhh yang sakit berapa, bulan ini dapat berapa, habis berapa kamu biyai setiap bulan itu. Uangmu habis berapa? Sekian, trus masih berapa? Kemudian, DPR ketuk palu, minta pemerintah mencairkan. Bisa pemerintah mencairkan...trus nombok,,gitu''? kan ndak bisa. Kan, gitu,..jikalau ada sisa uangnya, itu tetap tidak masuknya ke pengurus itu sendiri, tidak kepada pejabat BPJS. Seandainya suatu saat BPJS punya saldo itu tetap akan kembali kepada kas negara. Demikian itu maksud tujuan BPJS itu bagus, kenapa? Supaya orang kaya ikut juga membantu orang miskin. Makanya dipecah-pecah disana, ada yang kelas satu sekian, kelas dua dan kelas tiga sekian. Dan orang-orang miskin kan yang bayar pemerintah. Untuk yang gak miskin...bayar sendiri. Nah, bayar premi ini jangan dihitung uang sendiri. Bayar premi ini,,gini pokoknya ini saya kasih ke kas negara, ohh jadi kreditnya tolong mneolong,,makanya ayatnya *wa ta'awanu al albirri wa taqwa*. Artinya kan begini, kalau ndak memahami apa hubungannya BPJS dg ayat al-Quran itu, gitu kan. Toh, kalau al-Quran dan hadis dicari BPJS juga gak ada tho..maka ini adalah implementasi dari ayat-ayat yang umum, kemudian dicari hadis-hadisnya.

Paham ya?

Kenapa tidak ada relasinya?, bukan tidak ada...ada pak, gitu..karna memang di alquran dan hadis tidak ada BPJS. Gitukan? Haha coba carikan ayat berapa surat apa tentang BPJS? Gak ada itu. Nah begitu juga, bagaimana hukum mentaati pemerintah yang ingkar janji? Nah pasti dari umum dulu. Nah kemudian alquran dan hadis tidak menjadi pijakan, yang menjadi pijakan dalam bahtsul masail itu adalah pendapat ulama. Gitu...

Jadi karna kita ada hadis “man ra’a al-quran bira’yihi falyatabawwa’ maq’adahu ala an-nar”. Siapa yang memahami al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bertempatlah kamu dineraka...gitukan. maka, kita tidak boleh gegabah seperti itu. Nah, untuk memahami al-Quran, emmahami hadis, kita cukup mengikuti pendapat para ulama-ulama terdahulu, misalnya dalam kitab tafsir. Naahh gitu, jadi yang dimunculkan bukan ayat qurannya...tapi pendapat ulamanya dalam tafsir ibnu katsir..ha gitukan..mengatakan seperti ini. Dalam tafsir at-tabrani mengatakan seperti ini...gitu, bukan ayatnya yang dibahas. Karena ayatnya sudah selesai dibahas ulama.

*Ohh kalau gitu pantes dalam BM ini lebih banyak hadis yang dikutip dari kitab fiqh ya pak dibandingkan hadis yang diambil dari kitab hadis? kalau yang dari kitab fiqh itu ada 46 hadis, dan yang dari kitab hadis itu ada 36 hadis pak.*

Nah, itu makanya mekanisme diBM begitu..kita tidak kembali ke al-Quran. Tetapi memahami al-Quran hadis sebagaimana dipahami oleh para ulama. Karena para ulama tersebut lebih berkompeten untuk memahami itu. Gini, menafsirkan al-Quran al-Quran itu gak bisa..kan menyimpulkan sendiri ayat itu kan ndak boleh, kan ada kitab tafsir. Kalau dia menyimpulkan sendiri, berarti fal yatabawwak maq’dahu. Ia akan dineraka. Dia itu seolah-olah tau Allah kan. Maksudnya seperti ini..lho kamu maksudnya apa? Kan tidak boleh...makanya da’i harus hati-hati, sangat tidak mudahkan. Ayat itu bisa ditafsir dengan ayat...misalnya ayat-ayat lain. Atau dengan hadis. ada ndak hadis-hadis yang menjelaskan ayat ini?.misal, Allah menurunkan perintah sholat...iki sholat apo? Kan dial-Quran gak ada itu. Sholat ashur, sholat zuhur..gak ad..lalu cari hadis. ohh ternyata hadis nabi yang menyuruh sholat begini. Kalau hadisnya gak ada...maka cari pendapat sahabat tentang ayat itu. Karna shabat itu orang yang paling dekat dengan nabi. Sampai ibnu mas’ud berkata begini kan “tidak ada satu ayatpun yang diturunkan yang saya ndak tau asbabul wiridnya. Sebab kalau ada ayat al-Quran yang datang ke saya. Misalnya, ibnu mas’ud itu kalau ada ayat yang turun...umpamanya lagi dimana gitu. Langsung dapat kabar...langsung dicari, ini masalah apa ni ayat ini. Nah gitu.. sahabat yang mengunggakkapp tentang asbabaul wurud. Nah kalau sahabat itu gak tau...(25: 48) itu namanya ayat musyabihat.

Nah kalau kita mau nyoba-nyoba sendiri...ndak boleh.. karena ada hadis tadi, falyatabba’ ala an-nar. Jadi kita tidak memahami al-Quran dengan pemahaman

kita sendiri. Kalau gitu kan ....(26: 31) saya buat hadis...jangan dekati pohon beringin. Misalnya lagi “menghadaplah ke ka’bah” hehe zaman PPP dulu. Haha..kan partai ada 3 tu. Ada PPP, PDIP dan Golkar kan zaman orde baru kan.. yaaa itu berbeda tho itu...hahaha/. nah itu seperti itu.

Nah apalagi?

*Nah apakah ada standar hadis-hadis yang dijadikan hujjah? Maksudnya hadis-hadis yang dijadikan hujjah itu harus shahih, hasan dan dhoif. Kan di sini sy nemuin satu hadis yang menurut sebagian ulama adalah hadis palsu. Kenap? Ada standarnya atau tidak, atau semuanya boleh jadi hujjah?*

Yang pasti ada standarnya. Yang pertama dimunculkan adalah hadis yang shahih. Untuk penguta-penguatnya ada hadis yang hasan dan ada hadis yang sdhoif. Nah, kitakan kadang juga melihat sebagian hadis ini adalah shahih...nah tapi menurut ulama yang lain ini hasan. Naah gitu kan. Jadi perbedaan hadis itu tidak kita sepakati. Mungkin satu ulama bilang hadis dhoid dan sebagaian lain blang hasan atau shahih. Dn kita berhenti di hadis dhaif, kalau hadis maudhu’ kita ndak pakai. Kalau hadis itu ada keterangannya, berarti ada yang merawikan. Jadi ndak ada.....ini seperti ini gini...ada satu hadis yang maudhu’,,tetapi hadis tersbt belum disepakati.

Misalnya kan gini...kemarin itu ada cerita..pak fajar bilang seperti ini..kamu dr siapa..sy dari santrinya. Ah gak prnah bilang sperti itu...wah hoak jgn2..maudhu’. nah hoak itu kan maudhu’..nah kan ndak sama...dr si anu si anu...(29: 55). Nah, berarti dari jalur sana mengatakan dhoif..dan dari jalur yang disana mengatakan shahih. Ndak pernah dia bilang begitu,...saya itu mondok disana...tapi santri ini pernah dengar. Nah gitukan..berarti fauq nya maudhu’nya hadis ini dari jalur ini. Nah itu boleh dikutip.

*Oh jadi karena gitu makanya hadis tentang sahabat tadi boleh dikutip ya pak?*

Nah..iya...

Hasil wawancara: HM. ANIS MASDUKI, Lc. MA (sekretaris LBM NU Yogyakarta)

Saran yang disampaikan oleh penulis dalam tesis ini sangat bergantung pada saran yang pertama.

*Apakah ada standar NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah?*

Sebenarnya dalam penetapan hadis sebagai hujjah dalam tradisi NU tidak ada standar khusus. NU secara umum tidak mengkhususkan hadis-hadis yang shahih dan mutawatir dijadikan sebagai hujjah. Bahkan hadis dhaif juga dijadikan sebagai hujjah.

*Kenapa demikian?*

Karena dalam tradisi NU quran dan hadis bukanlah sandaran utama dalam menetapkan sebuah hukum. Yang paling utama adalah mengambil hukum dari kitab-kitab mu'tabar. Dalam merumuskan sebuah hukum para ulama NU bahkan tidak langsung serta merta mengatakan ini 'ini ayatnya atau ini hadisnya'. Hal tersebut terjadi karena ulama NU dalam hal ini tidak menempatkan dirinya sebagai mujtahid, tetapi sebagai muttabi'; mengikuti pendapat-pendapat para ulama ulama salafu shalih yang mempunyai kapasitas tersebut.

*Lalu, kenapa ada hadis di dalam hasil keputusan BM ini?*

Itu yang buat perumus, bukan musyawirinnya. Bahkan dalam musyawarah tersebut musyawirin tidak pernah berbicara tentang hal tersebut. hal ini berkaitan dengan persoalan interpretasi. Yang terpenting adalah 'ibarat kitab kuningnya. Hal ini telah diyakini bukan hanya secara ilmiah tapi juga secara teologis. Nah, sama..dalam kitab kuning juga demikian jarang sekali berbicara tentang kualitas hadis. ini ahad, ini shahih..misalnya begitu. Hal tersebut dipercaya tentunya sudah berdasarkan kepada al-Quran dan hadis.

Nah, persoalan

Nah. Kalau kita di wilayah tidak ada mencantumkan hadis sebagai hujjah. Nah kalau ada, ini bisa diteliti lagi. Tapi yang terpenting adalah bahwa NU tidak punya standar dalam menetapkan hadis-hadis tertentu yang dijadikan sebagai hujjah ketika memutuskan satu persoalan.

*Saya membaca, bahwa NU berprinsip bahwa tidak dibenarkan berisinbat langsung pada al-Quran dan sunnah. Namun, dalam hasil muktamar ini saya menemukan 36 hadis yang dikutip secara langsung sebagai hujjah. Apakah ini juga ditetapkan oleh perumus?*



Penelitian jenengan ini, dalam konteks saran.. supaya bahtsul masail membuat standarisasi dalam menetapkan dalilnya masuk. Tapi jadi catatan juga, bahwa NU tidak semuanya mengutip quran dan hadis sebagai dalilnya. Maka, jika yang diteliti sekedar relasi kuasa dalam penetapan hadis sebagai hujjah tidak semuanya ada. Kalau kemudian jenengan meneliti, kemudian diteliti, ya kemudian berarti ada dalam konteks itu. Artinya begini, jika jenengan menemukan sekitar 40 hadis yang dijadikan sebagai hujjah dalam beberapa bahtsul masail, lalu kemudian dalam penetapan tersebut ada relasi kuasanya,,,,maka hal ini ada benarnya, tapi tidak semua bahtsul masail dapat distandarkan semacam itu karena ada juga bahtsul masail yang tidak melakukan kutipan al-Quran dan sunnah, bahkan mayoritas tidak ada kan? Jadi kalau terjadi relasi kuasa dalam penetapan hadis itu ya terjadi sangat kasuistik. Tapi mayoritas tidak mengutip quran dan hadis tadi. Nah ini, misalnya tentang pemakzulan pemimpin....nah ini, tidak ada kan? Ni ada syarah nawawinya juga ya. Nah ini juga, banyak kasus gk ada kan ya....dan kalau ada ya kebanyakan gak langsung kan ya.

*Ya pak, kebanyakan tidak langsung, itu ada sekitar 46 hadis. kalau yang langsung ada 36 hadis pak.*

Nah iya, hal ini karena para musyawirinnya menempatkan dirinya sebagai mutabi', levelnya masih di bawah mujtahid. Dia mengikuti pendapat ulama,...ya dalam kitab kuning tadi, kalau ada hadisnya ya dicantumkan. Kalau gak ya..tidak. tapi itu bukan ijthadiyah. Kalau kemudian disitu ada al-Quran dan hadis berarti dia jadi mujtahid. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa al-Quran dan hadis ini bukan sebagai dalil, tapi Cuma sebagai pelengkap aja. Toh mereka juga mereka gak berani juga berbeda pendapat dengan yang di kitab kuning itu. Jadi mereka menempatkan diri sebagai mutabi'. Tapi itu kan tidak terpengaruh dengan judul penelitian jenengan ya,,namun ada relasi kuasanya jika al-Quran dan hadis itu dicantumkan.

*Baik pak. Jadi, intinya al-Quran dan hadis dalam Bahtsul masail ini bukan dasar utama dalam penetapan hukum ya pak? Cuma pelengkap saja begitu?*

Iya, Cuma untuk menguatkan, kalau itu dicantumkan secara langsung. Kalau yang tidak langsung kan hanya mengikuti pendapat ulama, ibarat kitab kuning kan? Kalau seperti tadi tu sekedar menguatkan saja. Sebenarnya yang menjadi objek penetapannya itu ya kitab kuning tadi. Yaaaa....bahtsul masail kalau di NU memang kayak gitu. Tidak seerti muhammadiyah, kalau muhammadiyah kan langsung pada al-Quran dan hadis. kemudian...itu menjadi objek istinbatnya. Kalau NU gak. Langsung ke kitab kuning itu...nah kalau gak ada baru ke Quran hadis itu. Itu sudah di wacanakan sejak munas di lampung. Dari ijthad qauli (sama dengan i'tibar), bari ijthad manhaji. Kalau ijthad manhaji itu berarti sudah mujtahid..tapi mujtahidnya mujtahid muntasib bukan mujtahid mustaqil. Kalau mujtahid mustaqil dia harus membuat metodologi sendiri. Kalau muntasib dia mengikuti metodologi ijthadnya para ulama imam mazhab. Tapi kalau mutabi'

dia mengikuti pendapat. Tidak ada kreasi intelektual seperti yang terjadi dalam mujtahid muntashib apalagi mustaqil tadi.

*Oh ya pak, gimana tadi pak. Ketika sidang berarti yang merumuskan beda lagi ya?*

Iya. Maka sesekali mb ikut sidangnya...hehe. jadi gini, dalam forum BM itu ada musyawirin, moderator, dan yang paling dihormati itu ada mushahhih (ini yang paling atas). Kemudian di bawahnya itu ada perumus. Kemudian baru moderator, dan yang terakhir itu musyawirin. Nah musyawirin ini yang terlibat dalam dinamika (menit 19:26)...dia yang mengungkapkan ibarat-ibarat sesuai as'ilah itu. As'ilah itu bukan hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan saja, tapi disertai dengan deskripsi-deskripsi masalahnya. Umpamanya tentang bagaimana hukum demonstrasi dengan mengecor kaki? Nah gitu nanti bukan hanya sekedar pertanyaan itu aj, ada juga deskripsi masalahnya. Nah seperti di daerah gendeng itu..nah begini begini...ada masalah pemerintah dan masyarakat..gitu. nah kemudian setelah itu, mungkin perspektif yang terkait apa..kemudian perspektif psikologi misalnya...kayak di skripsi ni misalnya (*maksudnya tesis ini-pen*). Nanti pas di forum itu, sumber ahli juga ada. Selain ada musyawirin, peserta, moderator kemudian ada tim perumus, kemudian ada mushahhih,..nah disitu juga ada ahli. Tim ahli itu, ya semua pertanyaan terkait kedokteran ya dokter dihadirkan disitu. Terkait astronomi ya ahli astronomi di hadirkan tapi ya dia tidak ikut dalam dinamika, dia menjelaskan perspektif keilmuan dia.

*Jadi gimana pak. Waktu pembahasan itu mushahhih dan perumusnya ada ditempat?*

Tidak. Yang membahas itu hanya musyawirin diatur dinamikanya oleh moderator. Kemudian nanti hasil yang disepakati musyawirin itu di analisis oleh perumus. Tapi itu sudah berupa hasil ya sudah mengerucutlah begitu. Kemudian sma tim perumus ibarat ibarat kitab kuning itu diketik dan diartikulasi lagi menjadi rumusan-rumusan ini. Naah, rumusan ini bukan ditangan musyawirin..tapi di tangan perumus. Nah, nanti setelah perumus membacakan hasil bm tersebut nanti mushahhih itu Cuma ketuk palu, itu kyai sepuh.

*Maaf pak itu tidak dalam forum yang sama?*

Iya dalam forum yang sama. Iya kan,,tugas perumus itu begitu. Jadi perumus itu hanya merumuskan.

*Jadi tugasnya hanya merumuskan yang telah disepakati pak?*

Iya. Tapi kalau ada silang pendapat di kalang musyawirin ya tim perumus juga ikut memutuskan. Perumus mengolah data, tim perumus bertanggung jawab untuk memutuskan. Kemudian disetujui oleh mushahhih ya ketuk palu la istilahnya. Itu kalau terjadi perbedaan pendapat. Kan ibarat itu berbeda antara satu sama yang

lain, atau ibarat yang diungkap itu sama...tapi mungkin salah paham. Kan gak semua musyawirinnya juga paham. Hahaha. Jadi disitu diluruskan pemahamannya. Jadi, ibarat yang paling kuat untuk dijadikan dalil hukum itu kemudian dicatat perumus. Kemudian perumus membahasakan menjadi ...ya kayak gini. Nanti dikasih waktu satu jam...yah gak sampe lah, ini paling seperempat jam selesai itu. Kemudian dibacakan..barulah mushahhah itu ketuk palu. Kemudian dibacakan fatihah. Udah selesai untuk satu isu. Nah nanti kalau ada lagi, mulai lagi dengan mekanisme yang sama. Nah, perumusan quran dan hadis sebagai penguat itu bisa jadi terjadi dalam forum itu, atau tidak. Dalam arti perumus itu menambahkan, dibacakan...ya kalau memang ada yang diungkap dari quran hadis ya dibacakan, kalau tidak ya tidak. Tapi tim perumus bisa saja menambahi quran hadis itu ketika dibacakan...bisa jadi juga nanti diluar forum. Karna tim perumus itu nanti bertanggung jawab untuk mensistematisasi begini. Itu tanggung jawab perumu sampai jadi begini. Karena mungkin ketika disampaikan mungkin belum sistematis yaa,,,trus apa namanya, ktikan nya masih salah-salah. Perumus bertanggung jawab.

*Jadi ini, hasilnya ini perumus yang buat ya pak? Mushahhah hanya menetapkan hasil akhir sj?*

Iya, menetapkan hasil akhir aj. Tapi yaa kadang bicara juga, pas deadlock misalnya. Fenomena yang sering muncul dalam BM itu kan tawaqquf. Tawaqquf itu deadlock. Misalnya data dilapangan kurang..atau misalnya ada isu sensitif apa gitu ya..itu kan juga bersumber dari masyarakat juga. Kalau mau diputuskan masih diperlukan gambaran yang lebih nyata dan lengkap nah itu tawaqquf itu. Rata2 musyawirin itu lebih menegdepankan sikap kehati-hatian. Dari pada target ini harus selesai gitu...akhirnya sering dikenalkan ya di NU itu tawaqquf/deadlock. Tim perumus sama mushahhah gimana? Ya sudah gitu aja.

*Kalau hal itu terjadi apakah dicantumkan juga diBM?*

Nggak. Itu nanti dibahas diforum yang lain...gak ditulis disini. Jadi disini gak ditulis, deskripsi..hasil tawaqquf. Gitu nggak.

Masalah kedua.

*Persoalan kedua yang dipertanyakan kemaren adalah tentang korelasi dalil yang dijadikan hujjah pak. Misalnya, hadis tentang BPJS. Pertanyaannya, apakah BPJS sesuai syariat islam atau tidak? Gitu pak, NU jawab ya..sesuai. salah satu dalilnya almuslimu akhul muslim. NU angkat hadis tentang ta'awun. Jadi kenapa hadis itu yang dianggap sebagai dalil? Apa korelasinya? Karna memang sepiantas itu kalau dibaca kayak tidak sinkron pak.*

Iya. Jadi begini.. yang terjadi dalam BM itu ada proses untuk mengkategorikan. Masalah hukum itu.. misalnya BPJS itu kan masuk pola mu'amalah. Jadi dia dalam pola akad apa? Sewa menyewa tidak, jual beli tidak, rahn tidak, etc. Masuklah itu dalam pinjam meminjam juga tidak...gitu. dalam kitab kuning itu juga gak ada. Namun dalam kitab kuning itu ada masalah yang kesana (menit 32:01)..BPJS itu dekatnya kemana gitu. Ternyata ada persoalan begitu...ya maknanya nanti dikiaskan. Ini ilhaq masail bi nazha'iriha. Itu yang terjadi.

Jadi ini proses ilhak pak?

Iya. Itu BPJS bisa dimasukkan dalam polanya itu sedekah atau taawun. Jadi dicarilah ibarat2 dalam kitab kuning tentang hal itu. Kemudian, kalau kan BM juga terbuka dalam kitab baru yang mu'tabar, otoritatif dan bisa dipertanggungjawabkan..yang ikut mazhab yang empat. Nah, kemudian hadis- hadis itu muncul belakangan...

Maksudnya belakangan di perumus pak?

Gak..kan ada BPJS misalnya tentang tolong menolong. Ya letakkan dalil wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Sebagai pemanis aja sebenarnya. Pelengkap. Hadis tadi juga gitu..datangnya belakangan itu...almusimu kalbunyam.

*Untuk posisi tidak mempengaruhi ya pak?*

Iya, gak ngaruh. Gini jika penjelasan dari kitab kuning itu sudah memadai, penjelasan ulama tentang ta'awun dan tadhammun itu ya...ayatnya sudah pasti ini tho, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, udah bisa ditebak. Jadi al-Quran dan hadis itu mengekor pada pendapat ulama. Bukan mengikut tapi dia dicantumkan dalam rangka memperkuat saja. Kalau, ulama gak sampai pada kesimpulan ayat quran itu ya gak ada ayat itu. Seumpama, yang muncul hukumnya haram maka ayatnya pasti bukan ini.

*Baik pak, ini hanya asumsi saya..udah ketemu hukumnya duluan, baru cari ayat dan hadisnya..begitu?*

iya begitu. Itulah yang terjadi. Memang adakalanya al-quran dan hadis itu ada dalam kitab kuning..maka itu yang sampean sebut tidak langsung ya kan. Ada ayat hadis itu yang tidak ada dalam kitab kuning itu lalu sama perumus dikarang-karang saja,.ditambah. apasih ayat hadis yang sesuai dengan masalah ini. Yang dijadikan istinbat para ulama...oh iya, ni hadsinya...ayatnya ini. Dan dicantumkan. Jadi mereka terbantuan dari ibarat para ulama untuk menemukan quran hadis nya. ‘

nah in, relasi kuasanya jadi agak lemah ini.. jika relasi kuasa itu jenengan maksudkan sebagai sebuah nilai tujuan gitu (...36: 29). Tapi dalam rumusannya ada al-quran dan hadisnya tidak masalah. Siapa tau memang ada.

*Iya pak, saya mengiranya al-Quran hadisnya memang ada sebelumnya.*

Tidak, kalau sampeyan ikut dalam dinamika itu,,memang tidak ada. Kemaren itu terakhir kita membahas boleh tidaknya membahas bagaimana hukumnya mensholatkan jenazah orang munafiq. Gak ada tu quran hadis tentang itu, hehehe semua ibarat ulama.

*Kalau yang diwilayah proses istinbat hukumnya juga begitu ?*

Iya, sama. Seragam kalau di NU itu. Tapi dalam tampilan ini rumusannya memang beda-beda ini. Kita merumuskan gak ada quran hadis mb. Ini ada beberapa muktamar, atau konferensi wilayah kan juga ada BM tu ya gak ada juga itu. Kalau pun ada ya seperti muktamar ini,,,sifatnya hanya untuk memperkuat. Karena prinsip awalnya di BM ini tidak mau memposisikan diri mereka sebagai mujtahid, itu bukan maqam nya. Segala pertanyaan hukum itu ada dalam ibarat kitab kuning itu, dan 95% itu ditemukan. Kalau tidak ditemukan sistemnya ilhaq, disamakan...ada gak subtansinya yang sama. Ya klw gak sama ya dibedakan...berarti ini ijihad yang sifatnya muntasib. Bagaimana ini jika diteropong dg metodenya imam syafi'i? Tidak berani kemudian lepas dari ulama mazhab hingga belum menjadi mujtahid yang mutlak.

*Ya jadi dari i'tibar, ilhaq dan ijihadm ijihad jarang sekali dilakukan ya ?*

Iya...jarang sekali. Paling hanya sekitar 2%. Karena persoalan istinbat hukum yang selama ini ditanyakan itu bisa diilha`q dalam kitab kuning. Bahkan bagaimana hukum demonstrasi dengan mengecor kaki misalnya ada kok dalam kitab kuning meskipun sistemnya bukan kasus yang sama tapi disamakan. Itu terkait dengan amar makruf nahi munkar, nanti cari kitab kuning yang ada amar ma'ruf nahi munkarnya..demonstrasi itukan dilakukan karna amar ma'ruf. Lalu apa boleh melakukan amar ma;ruf dengan cara melukai diri sendiri, membahayakan diri sendiri, boleh gk. Itukan ada dalam ibarat kitab kuning. Itu ilhaq. Tidak boleh seseorang melakukan amar makrur nahi munkar dnegan cara yang merugikan diri sendiri. Kemudian dengan melihat pertimbangan yang lain, dengan melukai diri sendiri itu belum tentu dapat merubah kebijakan pemerintah tersebut. nah pertimbangan-pertimbangan itu kalau dcari dalam quran hadis gak akan ketemu, seumpamanya ketemu pun mereka tidak berani untuk berijihad...(40:29). Jadi mereka mengeksplore dulu bagaimana pendapat ulama tentang bagaimana amar ma'ruf nahi munkar itu. Maka cari dulu pendapat ulamanya, baru ketemu quran hadis.

*Kemaren bu najwa mempermasalahkan hadis seputar kualitas saja kok.*

Ya kalau memang hadisnya dianalisis demikian..(41:38).

Realitas BM itu begitu, tp ya kita ada antisipasi juga tha ketika merumuskan relasi kuasanya itu...

43: 10

Penetapan hadis sebagai hujjah dalam BM tidak memperhatikan kualitasnya. Karena jal tersebut bersifat relaif dan bergantung pada pendapat para ulama. Jika ada satu hadis misalnya, ulama A bilang dhaif, Ulama B bilang hasan, maka hadis tersebut dapat dinaikkan derajatnya menjadi hasan lighairihi. Jadi perspektif ilmu hadisnya beda dalam penilaian ulama hadis. ya itu tidak bisa dipaksakan...meskipun dengan perspektif ilmu hadis yang lain. Karena ilmu hadiskan pada akhirnya juga bervariasi. Ya kalau hadis ya arah perdebatannya kesana to. Hadis ini shohe atau tidak,..gitu. tapi kalau BM yaa gak pernah bahas yang begituan. Hadis ini shahih atau tidak, ayat ini penafsirannya benar atau tidak mereka Cuma baca ibarat kitabnya. Jadi kalau ada quran hadis ya tim perumus itu yang masukkan tanpa sepengetahuan musyawirin atau kemungkinan sepengetahuan mereka namun tidak muncul dalam dinamika. Tapi sekali lagi, hal ini bukan yang pokoknya.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Pipin Armita  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Belit, 10 Mei 1992  
Alamat Asal : RT/RW 008/004, Desa Tanjung Belit, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, Riau.  
Alamat Sekarang : KP. Gendeng, GK. IV no. 773, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kab. Sleman, Yogyakarta.  
Email : pipinarmita@gmail.com  
Nama Ayah : Amri  
Nama Ibu : Neneng Syamsiah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN 016 Rambah, lulus tahun 2004.
  - b. MTs. PP. Daarun Nahdhah Tawalib Bangkinang, lulus tahun 2008.
  - c. MA. PP. Daarun Nahdhah Tawalib Bangkinang, lulus tahun 2011.
  - d. S1 (Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau), lulus tahun 2015.
2. Pendidikan non-formal
  - a. *Student of Master pro Institute (English Course with Amazing Methode)*, lulus tahun 2010.
  - b. Rumah Tahfiz Ababil Pekan Baru, Lulus Tahun 2014.

### C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Tahsin
2. Dewan Juri Akademi Da'i Cilik TVRI Riau tahun 2015.

### D. Prestasi/Penghargaan

1. Juara I Syarhil Quran MTQ tingkat Kabupaten Kampar tahun 2008.
2. Juara I lomba Pidato Bahasa Arab antar Pondok Pesantren se-Kabupaten Kampar tahun 2009.
3. Juara II Hadis Tingkat Wustha lomba Qiraatu al-Kutub antar Pondok Pesantren tahun 2009.
4. Juara I Syarhil Quran MTQ tingkat Kabupaten Kampar tahun 2010.
5. Peraih Lencana Emas sebagai Santri Terbaik PP. Daarun Nahdhah Tawalib Bangkinang tahun 2011.
6. Juara I pidato tiga bahasa Pekan Olah Raga Seni (PORSIMA) UIN Sultan Syarif Qasim Riau tahun 2012.

7. Juara I lomba Menulis Makalah Al-Quran MTQ Tingkat Kabupaten Kampar tahun 2012.
8. Juara III Syarhil Quran MTQ tingkat Provinsi Riau tahun 2012.
9. Juara II lomba Menulis Makalah Al-Quran MTQ Tingkat Kota Madya Pekanbaru tahun 2013.
10. Harapan III Lomba Menulis Makalah Al-Quran MTQ Tingkat Provinsi Riau tahun 2014.
11. Juara III Syarhil Quran Dalam Acara “Edukasi dan Hikmah dalam Isra’ Mi’raj” UIN Sulthan Syarif Kasim Riau tahun 2014.
12. Juara II Hifzhu al-Hadis UIN Sulthan Syarif Kasim Riau tahun 2013.
13. Juara I Juara I lomba Menulis Makalah Al-Quran oleh IKADI Tingkat Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014.
14. Juara I Juara I lomba Menulis Makalah Al-Quran MTQ Tingkat Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015.
15. Juara II Juara I lomba Menulis Makalah Al-Quran MTQ Tingkat Provinsi Riau tahun 2015.

#### **E. Pengalaman Organisasi**

1. Ketua Persatuan Santri Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Rokan Hulu (PSDKR) Tahun 2010-2011.
2. Ketua Mahasiswi Kelas International Tafsir Hadis UIN Sulthan Syarif Kasim Riau Tahun 2013-2014.
3. Anggota Divisi Humas dan Publikasi Rohis al-Fata al-Muntazhar tahun 2014.
4. Anggota Divisi Keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis UIN (HMJ-TH) UIN Sulthan Syarif Kasim Riau Tahun 2013-2014.
5. Anggota Divisi Keagamaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ushuluddin UIN Sulthan Syarif Kasim Riau Tahun 2013-2014.
6. Anggota Himpunan Mahasiswa Pelajar Riau Yogyakarta (HMPRY) 2017.

#### **F. Minat Keilmuan:**

Tafsir, Hadis, Hukum Islam.

#### **G. Karya Ilmiah**

1. Aplikasi Neurosains Perspektif al-Quran tahun 2013.
2. Al-Ankabut; Relevansi al-Quran dan Sains tahun 2014.
3. Konflik SARA di Indonesia tahun 2014.
4. Minimalisasi Rakyat Miskin di Negeri Kaya (Konstruksi Kesejahteraan Melalui Zakat Produktif) tahun 2015.
5. Ratu Saba’ di Zaman Nano; Kontroversi Kepemimpinan Wanita dalam Kacamata Islam tahun 2014.
6. Zikir; Metode Mencintai Allah tahun 2015.



7. Islam Nusantara (Studi Kritis terhadap Dialektika Keislaman di Indonesia) tahun 2016.
8. Islam Nusantara Dari Indonesia Untuk Peradaban Dunia (Islam Nusantara sebagai Inspirasi Peradaban) tahun 2016.
9. Al-Quran dan Multikulturalisme (Sebuah Telaah Akademik tentang Rejuvenasi Kesadaran Multikultural di Indonesia) tahun 2016.
10. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem* tahun 2017.
11. Analisis Pasal 39 ayat 3 tentang Larangan Menikah Karena sepersusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam tahun 2017.

Yogyakarta, 18 April 2017

(Pipin Armita)